

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN

Penyusunan Profil Kependudukan Provinsi merupakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Jumlah penduduk yang semakin bertambah dari tahun ke tahun akan berimplikasi terhadap meningkatnya kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, energi, meningkatnya kebutuhan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, meningkatnya persaingan lapangan kerja, semakin sempitnya lapangan dan peluang kerja, meningkatnya pengangguran khususnya bagi mereka yang tidak mampu bersaing.

Untuk mengatasi masalah kependudukan tersebut sudah barang tentu diperlukan data kependudukan yang benar, valid, dan akurat. Data penduduk yang dihasilkan dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) merupakan salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk mengetahui informasi kependudukan seperti jumlah penduduk, struktur dan komposisi penduduk serta persebarannya.

Tersedianya data kependudukan yang baik, dalam arti mampu mengobservasikan peristiwa-peristiwa vital, kelahiran, kematian, dan perpindahan dirasakan semakin penting dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.

Data dan informasi mengenai kependudukan yang sudah cukup lama dan tersebar di berbagai instansi atau lembaga pemerintahan sudah banyak dikembangkan untuk berbagai kebutuhan. Apabila data dan informasi yang ada tersebut berhasil diintegrasikan secara menyeluruh,

niscaya akan menjadi aset sekaligus informasi yang berarti untuk perencanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.

Komposisi data penduduk yang senantiasa berubah, wajib dimutakhirkan dan divalidasi secara berkelanjutan melalui mekanisme pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota, dimana saat ini telah terbangun dalam suatu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan telah terintegrasi dengan database e-KTP yang telah menjamin ketunggalan data dengan merekam data biometric penduduk seperti iris mata dan sidik jari sehingga keakuratan dan kevalidan data semakin tinggi.

Dengan demikian, upaya pengembangan sebuah sistem administrasi kependudukan memang merupakan suatu keharusan karena akan mendorong terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan tersedianya database kependudukan, khususnya yang bersumber pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Sejalan dengan itu guna memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa data kependudukan harus digunakan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan, maka dengan disusunnya Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat ini akan memberikan data dan informasi yang berguna untuk proses lebih lanjut dalam perencanaan, alokasi anggaran, pelayanan publik, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal bagi pihak-pihak terkait dan yang berkepentingan di Sumatera Barat.

B. TUJUAN

Adapun tujuan dari penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan ini adalah :

1. Memberikan informasi dan gambaran tentang kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan di Provinsi Sumatera Barat.
2. Sebagai alat publikasi dan meningkatkan pelayanan publik guna membangun komitmen semua pihak untuk lebih meningkatkan peran dan partisipasi penduduk dalam pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.
3. Sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.

C. RUANG LINGKUP

1. Kuantitas Penduduk, meliputi komposisi dan persebaran penduduk.
2. Kualitas Penduduk, yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial.
3. Kepemilikan dokumen kependudukan.

D. PENGERTIAN

1. **Penduduk** adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan.
2. **Kependudukan** adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
3. **Administrasi kependudukan** adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan sektor lain.

4. **Data** adalah fakta yang sudah ditulis dalam bentuk catatan, gambar atau direkam kedalam berbagai bentuk media.
5. **Database** kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
6. **Data kependudukan** adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
7. **Perkembangan kependudukan** adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
8. **Profil Perkembangan Penduduk** adalah gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan.
9. **Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)** adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggaraan dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
10. **Kuantitas penduduk** adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati dan pindah tempat tinggal.
11. **Kualitas penduduk** adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik serta ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, berkepribadian dan layak.
12. **Persebaran penduduk** adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.

13. **Struktur penduduk** adalah pengelompokan penduduk menurut karakteristik tertentu misalnya umur, jenis kelamin, pendidikan, agama, status hubungan dalam keluarga, status perkawinan dan lapangan pekerjaan.
14. **Pertumbuhan penduduk** adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk di suatu wilayah, dimana pertumbuhan penduduk tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah dan migrasi neto.
15. **Angka pertumbuhan penduduk** adalah besaran persentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya.
16. **Proporsi penduduk** adalah jumlah dan informasi penduduk menurut pengelompokan tertentu, seperti umur dan jenis kelamin.
17. **Rasio jenis kelamin** adalah perbandingan penduduk laki-laki terhadap perempuan di suatu wilayah tertentu dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki per seratus penduduk perempuan.
18. **Piramida Penduduk** adalah gambar yang menunjukkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang disajikan secara grafik;
19. **Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan (*dependency ratio*)** adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun atau lebih) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun). Rasio ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif terhadap penduduk tidak produktif.
20. **Rasio kepadatan penduduk** adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah atau

berapa banyaknya penduduk per kilometer persegi pada periode tahun tertentu.

21. **Penduduk Usia Kerja (Usia Produktif)** adalah penduduk yang berusia 15 tahun sampai dengan 64 tahun.
22. **Bekerja** adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam terus-menerus dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.
23. **Sekolah** adalah kegiatan seseorang untuk bersekolah di sekolah formal, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tertinggi, selama seminggu yang lalu sebelum pencacahan. Termasuk pula kegiatan dari mereka yang sedang libur sekolah.
24. **Mengurus rumah tangga** adalah kegiatan seseorang yang mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah, misalnya : ibu-ibu rumah tangga, dan anaknya yang membantu rumah tangga. Sebaliknya pembantu rumah tangga yang mendapat upah walaupun pekerjaannya mengurus rumah tangga dianggap bekerja.
25. **Kegiatan lainnya** adalah mereka yang sudah pensiun, orang-orang cacat jasmani (buta, bisu dan sebagainya) yang tidak melakukan suatu pekerjaan.
26. **Pendidikan tertinggi yang ditamatkan** adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah dengan mendapatkan tanda tamat (ijazah).
27. **Jenis pekerjaan/jenis jabatan** adalah macam pekerjaan yang sedang dilakukan oleh orang-orang yang termasuk golongan bekerja atau orang-orang yang sementara tidak bekerja, yang dibagi menjadi 8 golongan besar yaitu : 1) tenaga profesional, teknisi dan sebagainya; 2)

tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan; 3) tenaga tata usaha dan tenaga yang sejenis; 4) tenaga usaha penjualan; 5) tenaga usaha jasa; 6) tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan, perikanan; 7) tenaga produksi, operator alat angkutan, pekerja kasar; 8) lainnya.

28. **Status pekerjaan** adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

A. LETAK GEOGRAFIS DAERAH

Secara geografis, Provinsi Sumatera Barat terletak pada $1^{\circ} 54'$ Lintang Utara dan $3^{\circ} 30'$ Lintang Selatan serta $98^{\circ} 36'$ dan $- 101^{\circ} 53'$ Bujur Timur dan memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Utara.
- Sebelah Selatan dengan Provinsi Bengkulu dan Provinsi Jambi.
- Sebelah Timur dengan Provinsi Riau.
- Sebelah Barat dengan Samudera Hindia.

Provinsi Sumatera Barat terletak di pesisir barat bagian tengah pulau Sumatera yang terdiri dari dataran rendah di pantai barat dan dataran tinggi vulkanik yang dibentuk oleh Bukit Barisan. Provinsi ini memiliki daratan seluas 42.012,89 kilometer persegi. Dari luas tersebut, lebih dari 45,17 persen merupakan kawasan yang masih ditutupi hutan lindung. Garis pantai provinsi ini seluruhnya bersentuhan dengan Samudera Hindia sepanjang 2.420.357 kilometer dengan luas perairan laut 186.580 kilometer persegi. Kepulauan Mentawai yang terletak di Samudera Hindia termasuk dalam provinsi ini.

Seperti daerah lainnya di Indonesia, iklim Sumatera Barat secara umum bersifat tropis dengan suhu udara yang cukup tinggi, yaitu antara $22,6^{\circ}\text{C}$ sampai $31,5^{\circ}\text{C}$. Provinsi ini juga dilalui oleh garis khatulistiwa, tepatnya di Bonjol, Pasaman. Gunung tertinggi di Provinsi Sumatera Barat adalah Gunung Talamau dengan ketinggian 2.913 meter dari permukaan laut.

Sumatera Barat merupakan salah satu daerah rawan gempa di Indonesia. Hal ini disebabkan karena letaknya yang berada pada

jalur patahan Semangko, tepat di antara pertemuan dua lempeng benua besar, yaitu Eurasia dan Indo-Australia. Oleh karenanya, wilayah ini sering mengalami gempa bumi. Gempa bumi besar yang terjadi akhir-akhir ini di Sumatera Barat diantaranya adalah gempa bumi 30 September 2009 dan gempa bumi Kepulauan Mentawai Tahun 2010.

Provinsi Sumatera Barat berdiri pada tanggal 31 Juli 1958 berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958. Ibukota Provinsi Sumatera Barat adalah Kota Padang. Secara administratif, Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 12 Kabupaten, 7 Kota, 179 Kecamatan, 880 Desa, dan 232 Kelurahan. Kesembilan belas Kabupaten/Kota itu adalah :

- 1) Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 15 Kecamatan dan 182 Desa.
- 2) Kabupaten Solok terdiri dari 14 Kecamatan dan 74 Desa.
- 3) Kabupaten Sijunjung terdiri dari 8 Kecamatan dan 61 Desa.
- 4) Kabupaten Tanah Datar terdiri dari 14 Kecamatan dan 75 Desa.
- 5) Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 17 Kecamatan dan 60 Desa.
- 6) Kabupaten Agam terdiri dari 16 Kecamatan dan 82 Desa.
- 7) Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 13 Kecamatan dan 79 Desa.
- 8) Kabupaten Pasaman terdiri dari 12 Kecamatan dan 32 Desa.
- 9) Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari 10 Kecamatan dan 43 Desa.
- 10) Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 11 Kecamatan dan 52 Desa.
- 11) Kabupaten Solok Selatan terdiri dari 7 Kecamatan dan 39 Desa.
- 12) Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari 11 Kecamatan dan 19 Desa.
- 13) Kota Padang terdiri dari 11 Kecamatan dan 105 Kelurahan.

- 14) Kota Solok terdiri dari 2 Kecamatan dan 13 Kelurahan.
- 15) Kota Sawahlunto terdiri dari 4 Kecamatan, 27 Desa, dan 10 Kelurahan.
- 16) Kota Padang Panjang terdiri dari 2 Kecamatan dan 16 Kelurahan.
- 17) Kota Bukittinggi terdiri dari 3 Kecamatan dan 24 Kelurahan.
- 18) Kota Payakumbuh terdiri dari 5 Kecamatan dan 48 Kelurahan.
- 19) Kota Pariaman terdiri dari 4 Kecamatan, 55 Desa, dan 16 Kelurahan.

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan Kabupaten/Kota terbesar dengan luas wilayah 6.011,35 kilometer persegi atau 14,31 persen dari luas Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Kota Padang Panjang merupakan Kabupaten/Kota terkecil dengan luas wilayah 23 kilometer persegi atau 0,05 persen dari luas Provinsi Sumatera Barat.

B. KONDISI DEMOGRAFIS DAERAH

Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 adalah sebanyak 5.452.274 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 2.758.043 jiwa (50,59 persen) dan perempuan sebanyak 2.694.231 jiwa (49,41 persen). Penyebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 1.

Jika diperhatikan menurut jenis kelamin, nampak bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Gambaran ini terlihat di seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 1.
Jumlah Penduduk per Kabupaten/Kota berdasarkan Jenis Kelamin
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

NO	KABUPATEN/KOTA	JENIS KELAMIN (JIWA)		TOTAL (JIWA)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5
1	Kabupaten Pesisir Selatan	262.416	254.303	516.719
2	Kabupaten Solok	190.078	184.598	374.676
3	Kabupaten Sijunjung	118.042	114.707	232.749
4	Kabupaten Tanah Datar	182.954	182.086	365.040
5	Kabupaten Padang Pariaman	234.146	226.596	460.742
6	Kabupaten Agam	264.555	258.780	523.335
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	186.608	186.341	372.949
8	Kabupaten Pasaman	158.662	155.868	314.530
9	Kabupaten Kep. Mentawai	43.551	39.716	83.267
10	Kabupaten Dharmasraya	104.132	100.017	204.149
11	Kabupaten Solok Selatan	90.695	86.236	176.931
12	Kabupaten Pasaman Barat	217.877	209.481	427.358
13	Kota Padang	443.839	437.289	881.128
14	Kota Solok	34.027	33.915	67.942
15	Kota Sawahlunto	32.100	32.006	64.106
16	Kota Padang Panjang	26.701	26.234	52.935
17	Kota Bukittinggi	57.930	57.709	115.639
18	Kota Payakumbuh	65.016	64.346	129.362
19	Kota Pariaman	44.714	44.003	88.717
	SUMATERA BARAT	2.758.043	2.694.231	5.452.274

Sumber : DKB Semester II 2016 (diolah)

Tingkat pertumbuhan penduduk Provinsi Sumatera Barat untuk periode Semester I - Semester II Tahun 2016 adalah sebesar 0,56 persen. Penyebaran penduduk yang tidak merata dan luas wilayah Kabupaten/Kota yang berbeda-beda menyebabkan jumlah penduduk disetiap Kabupaten/Kota sangatlah bervariasi dengan tingkat kepadatan penduduk Provinsi Sumatera Barat adalah 129,78 jiwa per kilometer persegi.

Tingkat kepadatan penduduk tertinggi berada di Kota Bukittinggi yaitu 4.625,56 jiwa per kilometer persegi dengan luas wilayah yang hanya 25 kilometer persegi dan merupakan wilayah dengan luas terkecil kedua setelah Kota Padang Panjang. Hal ini disebabkan karena perkembangan penduduk Kota Bukittinggi yang tidak terlepas dari keberadaan dan peran kota ini sesuai dengan potensi dibidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, serta perdagangan dan jasa yang mengakibatkan meningkatnya arus urbanisasi yaitu perpindahan penduduk yang datang ke Kota Bukittinggi.

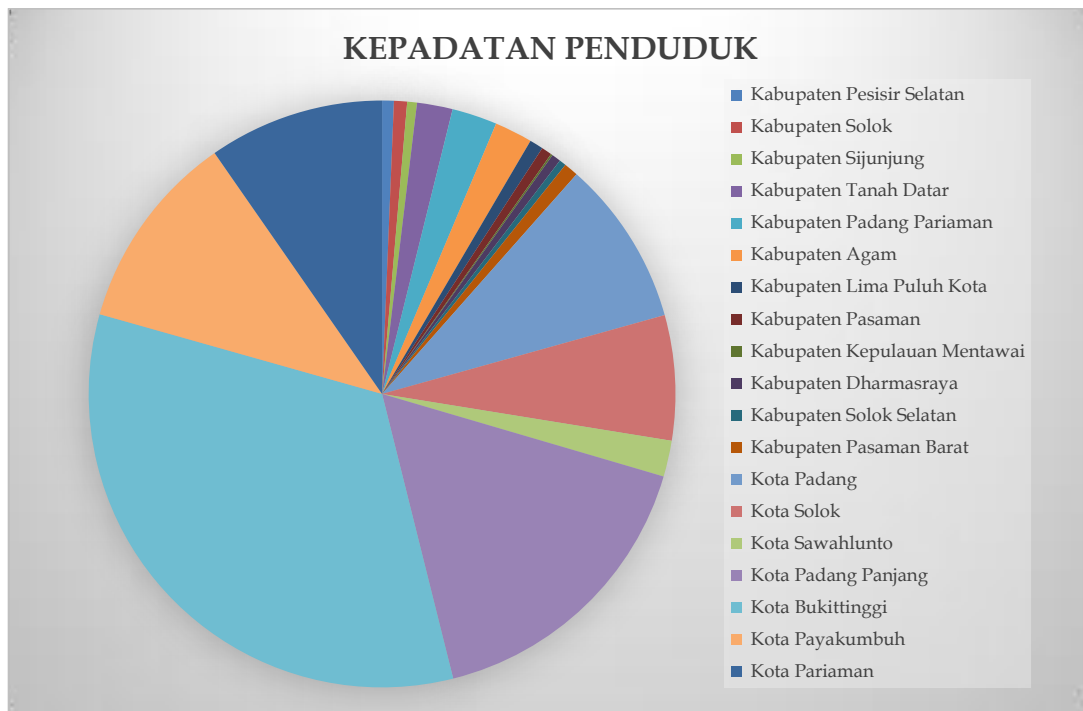
Sementara itu, wilayah dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu hanya 13,85 jiwa per kilometer persegi dengan luas wilayah terbesar yaitu 6.011 kilometer persegi. Ini disebabkan karena Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan Kabupaten yang bentuk wilayah geografisnya adalah kepulauan, dimana terdiri dari 4 (empat) pulau besar yang berpenghuni yaitu Pulau Siberut, Sipora, Pagai Utara, dan Pagai Selatan yang dihuni oleh mayoritas suku Mentawai dan 95 (sembilan puluh lima) pulau-pulau kecil lainnya yang menyebar di sekeliling Kabupaten Kepulauan Mentawai. Namun, sebagian besar pulau yang lain hanya ditanami dengan pohon kelapa dan jarak rumah penduduk yang jauh antara satu sama lainnya.

Gambaran jumlah penduduk, luas wilayah, dan kepadatan penduduk secara keseluruhan di Provinsi Sumatera Barat per Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel 2 dan Gambar 1.

Tabel 2.
Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

NO	KABUPATEN/KOTA	PENDUDUK (JIWA)	LUAS WILAYAH (Km ²)	KEPADATAN (JIWA/Km ²)
1	2	3	4	5
1	Kabupaten Pesisir Selatan	516.719	5.750	89,86
2	Kabupaten Solok	374.676	3.738	100,23
3	Kabupaten Sijunjung	232.749	3.130	74,36
4	Kabupaten Tanah Datar	365.040	1.336	273,23
5	Kabupaten Padang Pariaman	460.742	1.333	345,64
6	Kabupaten Agam	523.335	1.804	290,10
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	372.949	3.571	104,44
8	Kabupaten Pasaman	314.530	3.948	79,67
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	83.267	6.011	13,85
10	Kabupaten Dharmasraya	204.149	2.961	68,95
11	Kabupaten Solok Selatan	176.931	3.346	52,88
12	Kabupaten Pasaman Barat	427.358	3.888	109,92
13	Kota Padang	881.128	694	1.269,64
14	Kota Solok	67.942	71	956,93
15	Kota Sawahlunto	64.106	232	276,32
16	Kota Padang Panjang	52.935	23	2.301,52
17	Kota Bukittinggi	115.639	25	4.625,56
18	Kota Payakumbuh	129.362	85	1.521,91
19	Kota Pariaman	88.717	66	1.344,20
	SUMATERA BARAT	5.452.274	42.012	129,78

Sumber : DKB Semester II 2016 (diolah)



Gambar 1. Grafik Kepadatan Penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

Sedangkan berdasarkan agama, penduduk Provinsi Sumatera Barat didominasi oleh pemeluk agama Islam yaitu sebanyak 5.324.970 jiwa atau 97,67 persen dan pemeluk agama lainnya adalah Kristen sebanyak 78.187 jiwa atau 1,43 persen, Katholik sebanyak 44.995 jiwa atau 0,83 persen, Hindu sebanyak 109 jiwa atau 0 persen, Budha sebanyak 3.765 jiwa atau 0,07 persen, Konghucu sebanyak 8 jiwa atau 0 persen, dan Kepercayaan sebanyak 240 jiwa atau 0 persen.

C. GAMBARAN EKONOMI DAERAH

Perekonomian Sumatera Barat menunjukkan perbaikan moderat pada triwulan akhir 2016. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada triwulan IV 2016 tercatat tumbuh sebesar 4,86 persen atau meningkat tipis dibandingkan triwulan III 2016 sebesar 4,81 persen. Setelah berada pada posisi keempat di triwulan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Sumatera

Barat berada di urutan kedelapan untuk wilayah Sumatera pada periode laporan.

Secara keseluruhan tahun, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada tahun 2016 melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Perekonomian Sumatera Barat hanya tumbuh sebesar 5,26 persen melemah dibandingkan tahun 2015 sebesar 5,52 persen, bahkan lebih rendah dibandingkan historis 5 (lima) tahun terakhir (2011 - 2015) sebesar 6,03 persen. Sumber perlambatan terutama berasal dari konsumsi pemerintah, investasi, dan ekspor luar negeri. Secara sektoral, melemahnya kinerja lapangan usaha pertanian dan transportasi menjadi sumber perlambatan ekonomi tahun 2016.

Meskipun mengalami pemotongan anggaran DAK sebesar 10 persen dari yang dianggarkan, realisasi penerimaan daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) di Sumatera Barat tetap menunjukkan pertumbuhan yang positif. Penambahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tahun 2016, berdampak pada peningkatan DAK dibandingkan tahun sebelumnya. Di lain sisi, realisasi belanja daerah juga mengalami pertumbuhan yang positif dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2015. Semakin meningkatnya alokasi belanja daerah untuk Belanja Pegawai menyebabkan alokasi untuk Belanja Modal semakin menurun dari tahun 2015 ke tahun 2016.

Setelah mengalami inflasi yang cukup tinggi pada triwulan III tahun 2016, inflasi Sumatera Barat pada triwulan IV tahun 2016 mereda. Secara tahunan, laju inflasi Sumatera Barat pada triwulan IV tahun 2016 tercatat sebesar 4,89 persen atau lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 5,10 persen. Panen komoditas hortikultura pada Desember 2016 serta kebijakan penetapan harga tiket angkutan udara yang lebih rendah dari rata-rata historis pada penghujung tahun, menjadi faktor

pendukung menurunnya tekanan inflasi pada akhir tahun 2016. Dengan besaran inflasi tersebut, Provinsi Sumatera Barat tercatat sebagai provinsi dengan laju inflasi tahunan tertinggi keempat di kawasan Sumatera maupun secara nasional yakni setelah Bangka Belitung, Sumatera Utara, dan Bengkulu.

Secara umum, stabilitas keuangan daerah relatif terjaga baik dari korporasi maupun rumah tangga, di tengah penurunan kinerja perusahaan dan moderatnya daya beli masyarakat. Kinerja korporasi sedikit tertahan akibat keterbatasan perolehan bahan baku, faktor cuaca, dan pelemahan permintaan. Namun demikian, ditinjau dari sisi kemampuan membayar utang, korporasi di Sumatera Barat secara umum memiliki risiko yang relatif terjaga.

Struktur pengeluaran rumah tangga pada triwulan IV tahun 2016 tidak jauh berbeda dengan periode sebelumnya, yang masih didominasi oleh kebutuhan konsumsi. Periode puncak liburan akhir tahun mendorong peningkatan persentase pengeluaran untuk konsumsi, sedangkan porsi untuk tabungan relatif sama. Selain itu, pengeluaran untuk cicilan kredit menurun pasca mencapai puncaknya pada triwulan III tahun 2016.

LDR, sebagai cerminan fungsi intermediasi, bank umum di Sumatera Barat pada akhir tahun 2016 konsisten berada di level yang tinggi. Loan to Deposit Ratio (LDR), yaitu rasio antara jumlah kredit yang disalurkan bank terhadap jumlah DPK bank, yang pada akhir 2016 ini tercatat relatif stabil pada kisaran 145,2 persen dibandingkan tahun 2015. Sementara itu, meskipun mulai membaik dibandingkan triwulan III 2016, kualitas kredit bank umum di Sumatera Barat sepanjang tahun 2016 secara umum terus menurun dan perlu perhatian yang serius. Pada triwulan IV tahun 2016 rasio Non Performing Loans (NPL) perbankan menurun menjadi 3,2 persen dari triwulan sebelumnya sebesar 3,6 persen dan akhir tahun 2015 yang

hanya mencapai 2,7 persen. Penurunan kualitas kredit korporasi menjadi pendorong utama penurunan kualitas kredit.

Perkembangan transaksi non tunai di Sumatera Barat melalui Sistem Kliring Nasional Bank Inonesia (SKNBI) menunjukkan tren yang masih menurun secara nominal dan volume transaksi. Pada triwulan IV tahun 2016, volume transaksi kliring kembali mengalami penurunan sebesar 8,4 persen, meskipun sedikit membaik dibandingkan triwulan III 2016 yang mencatat penurunan 9,4 persen. Kondisi serupa juga terjadi pada nominal transaksi kliring yang turun 12,08 persen, lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatat penurunan 6,3 persen.

Sumatera Barat tercatat kembali mengalami net inflow, sedangkan daerah lain di Sumatera mengalami net outflow pada periode laporan. Net inflow pada triwulan IV tahun 2016 sebesar Rp. 173 miliar, menurun 52,32 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Net inflow tersebut ditengarai disebabkan oleh tingginya konsumsi masyarakat Sumatera Barat sehubungan dengan periode libur anak sekolah dan kenaikan sejumlah barang-barang kebutuhan pokok di akhir tahun.

Di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada tahun 2016, angka pengangguran terbuka pada Agustus 2016 menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya akibat perbaikan kinerja sektor pertambangan sehingga membutuhkan tambahan angkatan kerja untuk sektor tersebut. Pertumbuhan PDRB lapangan usaha pertambangan selama semester II 2016 laporan tercatat sebesar 7,77 persen seiring dengan peningkatan aktivitas pertambangan seperti batubara dan emas di beberapa kabupaten, mendorong penyerapan tenaga kerja di lapangan usaha tersebut. Secara umum, penyerapan tenaga kerja di Sumatera Barat masih didominasi oleh lapangan pekerjaan utama yakni pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan dengan status

pekerjaan sebagian besar bersifat informal dan tingkat pendidikan yang masih rendah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan rasio gini cenderung membaik di tengah meningkatnya persentase jumlah penduduk miskin. Peningkatan penduduk miskin tersebut terutama terjadi pada masyarakat pedesaan, sementara penduduk miskin masyarakat perkotaan relatif stabil. Di sisi lain, kualitas hidup masyarakat Sumatera Barat cenderung meningkat sebagaimana tercermin dari membaiknya IPM, diikuti dengan perbaikan pada ketimpangan atau ketidakmerataan ekonomi penduduk di Sumatera Barat.

D. POTENSI DAERAH

Sumatera Barat, salah satu provinsi di Indonesia di wilayah Pulau Sumatera, dilengkapi dengan keanekaragaman hayati. Dengan kondisi wilayah yang dikelilingi oleh laut dan juga barisan pegunungan, maka mengakibatkan daerah Sumatera Barat dikelilingi oleh hutan Hujan Tropis, dengan kondisi curah hujan dan kelembaban yang mendukung bagi berbagai jenis tanaman tropis. Oleh karena itu, hampir 70 persen wilayah hutan di Sumatera Barat dijadikan Hutan Konservasi (32 persen) dan Hutan Lindung (35 persen). Dukungan Geografi tersebut membuat sektor pertanian menjadi unggulan di Sumatera Barat dari sembilan jenis sektor usaha lainnya.

Tidak hanya hutan, Sumatera Barat juga terkenal dengan bentangan pegunungan Bukit Barisan. Pegunungan Bukit Barisan terbentang dari Utara Pulau Sumatera yaitu Nangroe Aceh Darusalam sampai ujung Selatan yaitu Lampung, dengan puncak tertinggi Gunung Kerinci yang terbentang di Jambi. Rangkaian Pegunungan Bukit Barisan merupakan rangkaian pergunungan pertemuan dari pelat tektonik Euroasia

dan Australia. Pelat Tektonik tersebut mengandung banyak mineral dan bebatuan. Kondisi geografis alam tersebut memberikan implikasi adanya keanekaragaman batuan yang mungkin mendukung kapasitas produksi daerah. Terkhusus di Sumatera Barat, yang terkenal adalah Pasaamen Area, masih dalam eksplorasi diperkirakan memiliki potensi tambang emas.

Sumatera Barat juga dapat dikategorikan sebagai daerah Hinterland untuk beberapa sektor yang dikuasai oleh Sumatera Barat. Hinterland merupakan istilah untuk daerah atau kota yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan di daerah lainnya, dengan spesifikasi komoditi tertentu. Kategori Hinterland tersebut dimaksudkan untuk daerah yang memiliki LQ atau *Location Quotient*. LQ menggambarkan seberapa besar porsi kapasitas produksi suatu sektor dapat memenuhi kebutuhan nasional di sektor tersebut. Jika LQ lebih dari 1, maka menandakan bahwa daerah tersebut menjadi Hinterland bagi daerah lain pada sektor tersebut, jika LQ kurang dari satu, maka daerah tersebut masih harus dibantu untuk memenuhi kebutuhan domestik daerah tersebut.

Iklim Sumatera Barat yang sangat mendukung untuk berbagai jenis tanaman dan kekayaan akan Hutan Hujan Tropis, maka dapat diperkirakan bahwa sektor pertanian di Sumatera Barat mampu mendukung kondisi kebutuhan pertanian di daerah lain. Hal ini terbukti dari perkembangan LQ Sumatera Barat dalam sektor pertanian bahan pangan yang meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005, LQ produksi pertanian bahan pangan menunjukkan angka 0,92, sedangkan pada tahun 2006, LQ melonjak mencapai 2,17, dan diperkirakan terus menguat sampai akhir 2008. Oleh karena itu potensi pertanian dan berbagai keanekaragaman hayati sangat besar dan masih layak untuk dikembangkan, melalui investasi teknologi dan ilmu pengetahuan Holtikultura.

Sesuai paparan di atas, kondisi iklim dan cuaca di Sumatera Barat mendukung untuk memiliki kondisi dan kekayaan hutan. Namun, kekayaan keanekaragaman jenis tanaman hutan hujan tropis Sumatera Barat membuat lebih dari 50 persen hutan dijadikan hutan lindung dan konservasi, namun angka LQ masih menunjukkan bahwa Sumatera Barat masih mampu mendukung kebutuhan hasil produksi hutan daerah lain. Pada tahun 2005 LQ produksi pertanian-kehutanan sebesar 2,47, yang artinya Sumatera Barat masih mampu memenuhi kebutuhan hasil produksi hutan oleh daerah lain.

Namun, terjadi penurunan pada tahun 2006, LQ menunjukkan posisi 1,6, sedangkan pertumbuhan hasil hutan mencapai 19,6 persen, sedangkan pada tahun sebelumnya hanya tumbuh 3,7 persen. Kondisi yang kontradiktif ini menunjukkan adanya implikasi perkembangan produksi di sektor lain melampaui perkembangan sektor kehutanan di Sumatera Barat. Walaupun begitu, Sumatera Barat masih mampu menjadi *Hinterland* bagi daerah lain pada sektor hasil sumber daya hayati.

Sumatera Barat masih membutuhkan investasi di pertambangan, 70 persen dari seluruh daerah di Sumatera Barat didominasi oleh bagian bentangan pegunungan bukit barisan. Mengingat bukit barisan merupakan jenis lempengan tektonik, maka sudah dapat diperkirakan bumi Sumatera Barat kaya akan sumber mineral batuan. Salah satu indikasinya adalah adanya pabrik Semen Padang di Sumatera Barat, yang menunjukkan bahwa adanya sumber batuan kapur. Beberapa daerah yang terkenal dengan hasil pertambangan tembaga, timah dan peraknya adalah area Sawahlunto dan Kabupaten Tanah Datar. Tanah Datar pada tahun 2005 berhasil membukukan nilai produksi batuan kapur sebesar Rp. 123 juta hanya untuk satu kabupaten.

Sawahlunto pernah menjadi tulang punggung perekonomian Sumatera Barat dengan spesifikasi batu bara. Kondisi topografi Sawahlunto yang terdiri dari perbukitan yang terjal mendukung untuk dikembangkannya areal pertambangan batu bara. Dari seluruh penggunaan tanah di Sawahlunto, sebenarnya areal pertambangan hanya memanfaatkan sebesar 3,25 persen, dan terluas adalah penggunaan untuk pertanian. Namun, dengan areal yang sedikit tersebut mampu memiliki cadangan yang siap diproduksi sebesar 53.176 juta ton batu bara, yang dihasilkan dari empat blok pertambangan, telah melampaui kebutuhan domestik Sumatera Barat sendiri yang berkisar pada angka 1,3 juta ton/tahun.

Kondisi ini memberikan implikasi masih kurangnya investasi di bidang pertambangan di Sawahlunto untuk meningkatkan hasil produksi batu baranya. Data BPS menunjukkan rata-rata nilai produksi batu bara Sumatera Barat mencapai nilai 212 milyar rupiah, dengan kondisi masih jauh dibawah potensial daerah. Oleh karena itu, masih besar potensi pertambangan yang harus dieksplorasi di Sumatera Barat.

Di sektor pariwisata, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, di Sumatera Barat telah ditetapkan 2 Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) yaitu DPN Mentawai Mentawai-Siberut dan Sekitarnya dan DPN Padang-Bukittinggi dan Sekitarnya. Dari 2 DPN tersebut telah ditetapkan 10 Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) yaitu :

1. KPPN Siberut dan sekitarnya.
2. KPPN Sipora dan sekitarnya.
3. KPPN Pagai Utara dan sekitarnya.

4. KPPN Padang dan sekitarnya.
5. KPPN Bukittinggi dan sekitarnya.
6. KPPN Singkarak dan sekitarnya.
7. KPPN Batusangkar dan sekitarnya.
8. KPPN Maninjau dan sekitarnya.
9. KPPN Sawahlunto dan sekitarnya.
10. KPPN Pesisir Selatan dan sekitarnya.

Dengan telah ditetapkannya secara normatif potensi yang dimiliki Sumatera Barat di bidang kepariwisataan oleh Pemerintah Pusat, maka kedepan arah pengembangan kepariwisataan oleh Pemerintah Daerah akan semakin jelas. Kekhasan wilayah geografi dan bentuk topografi, mulai dari daerah pesisir pantai, pulau-pulau, sampai dengan daerah dataran tinggi, pegunungan, danau dan sungai menjadi potensi pengembangan pariwisata Sumatera Barat.

Keunikan wilayah Sumatera Barat didukung pula oleh iklim tropis sebagai daerah perlintasan garis khatulistiwa. Keindahan alami hutan tropis dan keelokan pemandangan jajaran perbukitan, sawah dan ladang di sepanjang jalan yang menghubungkan antar daerah dan wilayah Sumatera Barat telah didukung dengan sarana prasarana jalan dan transportasi yang memadai, menjadi bagian dari potensi pengembangan pariwisata.

Penduduk Sumatera Barat yang ramah, religius dan terbuka menganut nilai-nilai matriakat yang berbeda dengan masyarakat daerah lainnya di Indonesia yang menganut sistim patriakat. Keunikan lokal seperti ini dan hal lainnya yang terkait budaya, kesenian, kearifan lokal, kuliner dan peran sejarah dalam kemerdekaan RI telah memperkaya potensi wisata Sumatera Barat. Dengan beragamnya objek dan tujuan wisata yang dapat dikunjungi serta dinikmati di Sumatera Barat, maka

pariwisata berpotensi sebagai lokomotif dalam percepatan pembangunan daerah.

Berdasarkan data BPS, jumlah wisatawan mancanegara (Wisman) yang datang ke Sumatera Barat melalui Bandara Internasional Minangkabau (BIM) dan Pelabuhan Teluk Bayur bulan Desember 2016 mencapai 5.225 orang, mengalami peningkatan 2,15 persen dibanding Wisman bulan November 2016 yang tercatat sebanyak 5.115 orang.

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Sumatera Barat bulan Desember 2016 mencapai rata-rata 61,51 persen, mengalami peningkatan 0,73 poin dibanding TPK bulan November 2016 sebesar 60,78 persen.

Rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada hotel berbintang bulan Desember 2016 tercatat 1,51 hari, meningkat 0,08 hari bila dibandingkan dengan November 2016 yang tercatat 1,43 hari.

Jumlah penumpang angkutan udara domestik di Bandara Internasional Minangkabau pada bulan Desember 2016 meningkat sebesar 21,26 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara, jumlah penumpang angkutan udara internasional juga mengalami peningkatan sebesar 25,97 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

BAB III

SUMBER DATA DAN KOMPONEN KEPENDUDUKAN

A. SUMBER DATA

Hasil dari pemanfaatan database kependudukan pada dasarnya mencakup struktur umur, komposisi dan persebaran penduduk. Dari struktur umur dapat diturunkan (dihitung) berbagai indikator seperti umur median (*median age*), rasio jenis kelamin (*sex ratio*), piramida penduduk, rasio ketergantungan (*dependency ratio*), dan indikator lainnya. Dari komposisi penduduk, database kependudukan dapat memberikan informasi dari aspek sosial seperti pendidikan, status perkawinan, agama dan status hubungan dalam rumah tangga. Sedangkan dari aspek penyebaran penduduk memperlihatkan bagaimana distribusi penduduk menurut kabupaten/kota dan juga dapat dihitung dan diketahui rasio kepadatan penduduk (*population density ratio*).

Adapun database kependudukan yang telah diolah ini bersumber dari database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang terintegrasi dengan database e-KTP dan telah dibersihkan (dikonsolidasikan) secara nasional oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk posisi per 31 Desember 2016.

Publikasi informasi perkembangan kependudukan berupa jumlah penduduk, struktur dan komposisi penduduk, distribusi dan kepadatan penduduk. Komposisi penduduk dapat berupa data kuantitas penduduk mencakup bidang kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial dan administrasi kependudukan dilakukan secara periodik untuk memberikan informasi pada stakeholder disetiap level pemerintahan.

B. KOMPONEN KEPENDUDUKAN

1. Kuantitas Penduduk

Komposisi dan Persebaran Penduduk

Bagian ini menjelaskan mengenai komposisi dan persebaran (distribusi) penduduk dilihat dari berbagai aspek atau karakteristik.

Penduduk dapat dikelompokkan menurut karakteristik tertentu, seperti kelompok umur, karakteristik sosial ekonomi, dan persebaran atau distribusi tempat tinggalnya.

Pengelompokan ini sangat berguna untuk :

- Mengetahui jumlah sumber daya manusia yang ada menurut umur, jenis kelamin maupun karakteristik lainnya.
- Mengembangkan suatu kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan berwawasan kependudukan.
- Menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas yang diperlukan.
- Membandingkan keadaan suatu penduduk dengan keadaan penduduk lainnya.
- Mengetahui “proses demografi” yang telah terjadi pada penduduk melalui piramida penduduk.

Komposisi penduduk berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik tertentu dapat diklasifikasikan menurut :

- Karakteristik demografi, seperti umur, jenis kelamin, jumlah wanita usia subur, dan jumlah anak.
- Karakteristik sosial, antara lain tingkat Pendidikan dan status perkawinan.
- Karakteristik ekonomi, antara lain kegiatan penduduk yang aktif secara ekonomi, lapangan usaha, status dan jenis pekerjaan, serta tingkat pendapatan.

- Karakteristik geografis atau persebaran, antara lain berdasarkan tempat tinggal, daerah perkotaan-pedesaan, kecamatan, provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Sedangkan persebaran (distribusi) penduduk adalah kondisi sebaran penduduk menurut keruangan. Sementara itu, penyebaran adalah upaya mengubah persebaran penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Persebaran penduduk (distribusi penduduk) dibedakan menjadi dua, yaitu :

- Persebaran penduduk secara geografis.
- Persebaran penduduk berdasarkan administrasi pemerintahan.

a. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Demografi

Karakteristik penduduk sangat berpengaruh terhadap proses demografi dan tingkah laku sosial ekonomi. Karakteristik penduduk yang paling penting adalah umur dan jenis kelamin. Distribusi penduduk menurut umur dikelompokkan menurut umur satu tahunan atau umur tunggal (*single age*) dan lima tahunan, namun dapat juga dikelompokkan menurut distribusi umur tertentu sesuai dengan kebutuhan, seperti pengelompokan penduduk menurut usia sekolah (SD = 7-12 tahun; SLTP = 13-15 tahun; SLTA = 16-18 tahun; dan Perguruan Tinggi = 19-24 tahun).

Selain pengelompokan berdasarkan distribusi umur penduduk, terdapat juga pengelompokan penduduk berdasarkan struktur umur penduduk yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok besar, yaitu :

- Penduduk usia muda, yaitu penduduk usia dibawah 15 tahun atau kelompok umur 0-14 tahun.

- Penduduk usia produktif, yaitu penduduk umur 15-59 tahun.
- Penduduk usia lanjut, yaitu penduduk umur 60 tahun keatas (mengikuti ketentuan WHO).

Struktur penduduk menurut umur dapat digunakan untuk mengetahui apakah penduduk di suatu wilayah termasuk kelompok umur muda atau tua. Penduduk suatu wilayah dianggap penduduk muda apabila jumlah penduduk yang berumur dibawah 15 tahun mencapai sebesar 40 persen atau lebih.

Suatu daerah yang mempunyai karakteristik penduduk muda membutuhkan investasi sosial ekonomi yang berbeda dengan investasi untuk kelompok penduduk tua. Kelompok penduduk muda membutuhkan fasilitas pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sandang dan lain sebagainya. Sementara kelompok penduduk tua tidak membutuhkan fasilitas pendidikan, tetapi fasilitas untuk ketenagakerjaan, kesehatan, kebutuhan sosial lainnya dan lain sebagainya.

Indikator yang menunjukkan komposisi penduduk menurut karakteristik demografi adalah :

- Umur Median (*Median Age*)
- Rasio Jenis Kelamin (*sex ratio*)
- Rasio Ketergantungan atau Rasio Beban Tanggungan (*dependency ratio*)

1) Jumlah Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk di suatu wilayah, dimana pertumbuhan penduduk tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah dan

migrasi neto. Secara terus menerus jumlah penduduk akan dipengaruhi oleh banyaknya bayi yang lahir (menambah jumlah penduduk), tetapi disisi lain akan dikurangi oleh jumlah kematian yang terjadi pada semua kelompok umur. Sementara itu migrasi juga berperan dalam mempengaruhi jumlah dimana penduduk imigran (pendatang) akan menambah dan emigran (penduduk yang keluar) akan mengurangi jumlah penduduk. Jadi, pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh tiga komponen demografi, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi (masuk/*inmigration* dan keluar/*outmigration*). Selisih antara fertilitas dan mortalitas disebut perubahan reproduktif (*reproductive change*) atau pertumbuhan alamiah (*natural growth*), sedangkan selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar disebut migrasi neto (*net migration*).

Namun, dengan telah berjalannya sistem registrasi penduduk melalui pelayanan pendaftaran penduduk, maka data jumlah penduduk dapat diketahui secara langsung dari database kependudukan pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK) dan telah dibersihkan (dikonsolidasikan) oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri setiap 6 (enam) bulan sekali dan menjadi Data Konsolidasi Bersih (DKB).

Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat menurut Wilayah dan Jenis Kelamin per 31 Desember 2016 dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah ini :

Tabel 3.
Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat menurut Wilayah
Dan Jenis Kelamin per 31 Desember 2016

KODE	KABUPATEN/KOTA	JENIS KELAMIN (jiwa)					
		LAKI-LAKI	%	PEREMPUAN	%	TOTAL	%
1301	Kab. Pesisir Selatan	262.416	9,51	254.303	9,44	516.719	9,48
1302	Kab. Solok	190.078	6,89	184.598	6,85	374.676	6,87
1303	Kab. Sijunjung	118.042	4,28	114.707	4,26	232.749	4,27
1304	Kab. Tanah Datar	182.954	6,63	182.086	6,76	365.040	6,70
1305	Kab. Padang Pariaman	234.146	8,49	226.596	8,41	460.742	8,45
1306	Kab. Agam	264.555	9,59	258.780	9,60	523.335	9,60
1307	Kab. Lima Puluh Kota	186.608	6,77	186.341	6,92	372.949	6,84
1308	Kab. Pasaman	158.662	5,75	155.868	5,79	314.530	5,77
1309	Kab. Kepulauan Mentawai	43.551	1,58	39.716	1,47	83.267	1,53
1310	Kab. Dharmasraya	104.132	3,78	100.017	3,71	204.149	3,74
1311	Kab. Solok Selatan	90.695	3,29	86.236	3,20	176.931	3,25
1312	Kab. Pasaman Barat	217.877	7,90	209.481	7,78	427.358	7,84
1371	Kota Padang	443.839	16,09	437.289	16,23	881.128	16,16
1372	Kota Solok	34.027	1,23	33.915	1,26	67.942	1,25
1373	Kota Sawahlunto	32.100	1,16	32.006	1,19	64.106	1,18
1374	Kota Padang Panjang	26.701	0,97	26.234	0,97	52.935	0,97
1375	Kota Bukittinggi	57.930	2,10	57.709	2,14	115.639	2,12
1376	Kota Payakumbuh	65.016	2,36	64.346	2,39	129.362	2,37
1377	Kota Pariaman	44.714	1,62	44.003	1,63	88.717	1,63
	SUMATERA BARAT	2.758.043	100,00	2.694.231	100,00	5.452.274	100,00

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2016 (diolah)

Jika diperhatikan menurut jenis kelamin, nampak bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan dan gambaran ini terlihat di hampir semua Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

2) Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Informasi tentang jumlah penduduk menurut jenis kelamin, penting diketahui terutama untuk mengetahui banyaknya orang yang tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu. Selain itu, jumlah dan proporsi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat digunakan untuk merencanakan pelayanan sosial

ekonomi seperti pendidikan, kesehatan, sandang, pangan dan papan serta kebutuhan sosial dasar lainnya sesuai kelompok umur penduduk. Informasi jumlah dan proporsi umur penduduk dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik atau piramida penduduk, sehingga memudahkan untuk menginterpretasikan informasi tersebut.

Distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat disajikan dalam bentuk tabel menurut umur tunggal, kelompok umur lima tahunan atau kelompok umur yang sesuai dengan kebutuhan seperti pengelompokan umur usia sekolah.

Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4, yang menunjukkan bahwa penduduk Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016 sebagian besar merupakan penduduk usia produktif yaitu pada kelompok umur antara 15-64 tahun dengan komposisi terbesar berada pada penduduk berumur 15-24 tahun. Demikian pula dengan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, nampak bahwa penduduk laki-laki yang terbesar berada pada kelompok umur 10-24 tahun, sedangkan penduduk perempuan juga berada pada kelompok umur 10-24 tahun. Kondisi ini sangat menguntungkan karena sebagian besar (diatas 50 persen) yaitu sebesar 68,35 persen merupakan penduduk usia kerja (usia produktif), dan sisanya sebanyak 25,49 persen merupakan penduduk usia muda (berusia dibawah 15 tahun) dan 6,16 persen merupakan penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas).

Tabel 4.
Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat menurut Kelompok Umur
Dan Jenis Kelamin per 31 Desember 2016

KELOMPOK UMUR	JENIS KELAMIN (JIWA)				TOTAL (JIWA)	
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN			
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
00-04	183.368	6,65	170.122	6,31	353.490	6,48
05-09	261.426	9,48	242.786	9,01	504.212	9,25
10-14	274.976	9,97	257.115	9,54	532.091	9,76
15-19	269.991	9,79	254.603	9,45	524.594	9,62
20-24	251.175	9,11	238.471	8,85	489.646	8,98
25-29	220.811	8,01	206.547	7,67	427.358	7,84
30-34	235.253	8,53	217.921	8,09	453.174	8,31
35-39	206.075	7,47	193.305	7,17	399.380	7,33
40-44	185.810	6,74	185.541	6,89	371.351	6,81
45-49	154.760	5,61	156.230	5,80	310.990	5,70
50-54	140.131	5,08	148.867	5,53	288.998	5,30
55-59	123.135	4,46	129.675	4,81	252.810	4,64
60-64	100.847	3,66	107.298	3,98	208.145	3,82
65-69	59.240	2,15	62.214	2,31	121.454	2,23
70-74	40.672	1,47	51.941	1,93	92.613	1,70
> 75	50.373	1,83	71.595	2,66	121.968	2,24
JUMLAH	2.758.043	100,00	2.694.231	100,00	5.452.274	100,00

Sumber : Data Konsolidasi Bersih/DKB Semester II 2016 (diolah)

Penduduk berusia kurang dari 15 tahun cukup besar pula yaitu seperempat penduduk Provinsi Sumatera Barat berjumlah 1.389.793 jiwa (25,49 persen). Hal ini harus menjadi perhatian karena 5 tahun mendatang kelompok ini akan menjadi entry tenaga kerja baru, yang memerlukan skill dan kualitas SDM yang memadai baik keterampilan maupun etos kerja dan kepribadian. Untuk memperoleh hal tersebut, diperlukan asupan gizi yang cukup, pendidikan yang memadai serta lingkungan pergaulan yang positif, baik di rumah maupun di masyarakat sehingga ketika mereka memasuki pasar kerja, mampu bersaing

memperoleh peluang kerja yang tersedia. Disisi yang lain diharapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus mampu pula menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi.

Jika dicermati lebih lanjut, ternyata 353.490 jiwa (6,48 persen) penduduk Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016 merupakan balita. Kondisi ini juga menuntut perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penanganan penduduk balita terutama dari segi kesehatan dan investasi bidang pendidikan.

a) Umur Median (*Median Age*)

Umur median adalah umur yang membagi penduduk menjadi dua bagian dengan jumlah yang sama, yaitu bagian yang pertama lebih muda dan bagian yang kedua lebih tua dari umur median. Kegunaan dari umur median adalah untuk mengukur tingkat pemusatan penduduk pada kelompok-kelompok umur tertentu.

Berdasarkan umur median ini, penduduk di suatu daerah dikategorikan :

- Penduduk muda, jika umur median kurang dari 20 tahun.
- Penduduk intermediate, jika umur median antara 20-30 tahun.
- Penduduk tua, jika umur median lebih dari 30 tahun.

Berdasarkan Tabel 5, dapat dihitung umur median (*median age*) di Provinsi Sumatera Barat yaitu sebagai berikut :

$$\text{Umur Median (Md)} = I_{Md} + \left(\frac{\frac{N}{2} - f_x}{f_{Md}} \times i \right)$$

$$\text{Umur Median (Md)} = 25 + \left(\frac{2.726.137 - 2.404.033}{427.358} \times 5 \right)$$

$$\text{Umur Median (Md)} = 25 + 3,77$$

$$\text{Umur Median (Md)} = \mathbf{28,77 \text{ tahun}}$$

Keterangan :

I_{Md} = Batas bawah kelompok umur yang mengandung $N/2$

N = Jumlah penduduk total

f_x = Jumlah penduduk kumulatif sampai dengan kelompok umur yang mengandung $N/2$

f_{Md} = Jumlah penduduk pada kelompok umur dimana terdapat nilai $N/2$

i = Kelas interval umur

Tabel 5.
Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016

KELOMPOK UMUR	Jumlah Penduduk	Kumulatif (fx)	% Kumulatif
00-04	353.490	353.490	6,48
05-09	504.212	857.702	15,73
10-14	532.091	1.389.793	25,49
15-19	524.594	1.914.387	35,11
20-24	489.646	2.404.033	44,09
25-29	427.358	2.831.391	51,93
30-34	453.174	3.284.565	60,24
35-39	399.380	3.683.945	67,57
40-44	371.351	4.055.296	74,38
45-49	310.990	4.366.286	80,08
50-54	288.998	4.655.284	85,38
55-59	252.810	4.908.094	90,02
60-64	208.145	5.116.239	93,84
65-69	121.454	5.237.693	96,06
70-74	92.613	5.330.306	97,76
> 75	121.968	5.452.274	100,00
JUMLAH	5.452.274		

Sumber : DKB Semester II 2016 (diolah)

Dengan demikian, umur median penduduk Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 adalah 28,77 tahun, yang berarti setengah penduduk Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 berusia dibawah 28,77 tahun dan setengahnya lagi berusia lebih tua dari 28,77 tahun. Umur median ini terletak diantara 20-30 tahun. Dengan kata lain, penduduk Provinsi Sumatera Barat dikategorikan sebagai penduduk *intermediate* yaitu transisi dari muda (*young population*) ke penduduk tua (*old population*).

b) Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*)

Rasio Jenis Kelamin (RJK) adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan.

Besar kecilnya rasio jenis kelamin ini dipengaruhi oleh :

- Rasio jenis kelamin waktu lahir (*sex ratio at birth*), biasanya perbandingan antara bayi laki-laki dan perempuan pada waktu lahir berkisar antara 103-105 bagi laki-laki per 100 bayi perempuan.
- Pola mortalitas antara penduduk laki-laki dan perempuan.
- Pola migrasi antara penduduk laki-laki dan perempuan.

Informasi tentang rasio jenis kelamin dapat disajikan menurut kelompok umur maupun wilayah dalam bentuk tabel maupun grafik. Informasi ini dapat berguna untuk perencanaan pembangunan berwawasan gender, terutama

yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Selain itu, informasi rasio jenis kelamin juga penting diketahui oleh para politisi, terutama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen.

Rasio jenis kelamin berdasarkan wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 dan rasio jenis kelamin berdasarkan kelompok umur Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 disajikan pada Tabel 6 dan Tabel 7, berikut ini :

Tabel 6.
Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

NO	KABUPATEN/KOTA	JENIS KELAMIN (JIWA)		TOTAL (JIWA)	Sex Ratio
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1	Kabupaten Pesisir Selatan	262.416	254.303	262.416	103,19
2	Kabupaten Solok	190.078	184.598	190.078	102,97
3	Kabupaten Sijunjung	118.042	114.707	118.042	102,91
4	Kabupaten Tanah Datar	182.954	182.086	182.954	100,48
5	Kabupaten Padang Pariaman	234.146	226.596	234.146	103,33
6	Kabupaten Agam	264.555	258.780	264.555	102,23
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	186.608	186.341	186.608	100,14
8	Kabupaten Pasaman	158.662	155.868	158.662	101,79
9	Kabupaten Kep. Mentawai	43.551	39.716	43.551	109,66
10	Kabupaten Dharmasraya	104.132	100.017	104.132	104,11
11	Kabupaten Solok Selatan	90.695	86.236	90.695	105,17
12	Kabupaten Pasaman Barat	217.877	209.481	217.877	104,01
13	Kota Padang	443.839	437.289	443.839	101,50
14	Kota Solok	34.027	33.915	34.027	100,33
15	Kota Sawahlunto	32.100	32.006	32.100	100,29
16	Kota Padang Panjang	26.701	26.234	26.701	101,78
17	Kota Bukittinggi	57.930	57.709	57.930	100,38
18	Kota Payakumbuh	65.016	64.346	65.016	101,04
19	Kota Pariaman	44.714	44.003	44.714	101,62
	SUMATERA BARAT	2.758.043	2.694.231	2.758.043	102,37

Sumber : DKB Semester II 2016 (diolah)

Tabel 7.
Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan Kelompok Umur
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

KELOMPOK UMUR	JENIS KELAMIN (JIWA)		TOTAL (JIWA)	Sex Ratio
	LAKI-LAKI	PEREM PUAN		
00-04	183.368	170.122	353.490	107,79
05-09	261.426	242.786	504.212	107,68
10-14	274.976	257.115	532.091	106,95
15-19	269.991	254.603	524.594	106,04
20-24	251.175	238.471	489.646	105,33
25-29	220.811	206.547	427.358	106,91
30-34	235.253	217.921	453.174	107,95
35-39	206.075	193.305	399.380	106,61
40-44	185.810	185.541	371.351	100,14
45-49	154.760	156.230	310.990	99,06
50-54	140.131	148.867	288.998	94,13
55-59	123.135	129.675	252.810	94,96
60-64	100.847	107.298	208.145	93,99
65-69	59.240	62.214	121.454	95,22
70-74	40.672	51.941	92.613	78,30
> 75	50.373	71.595	121.968	70,36
JUMLAH	2.758.043	2.694.231	5.452.274	102,37

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2016 (diolah)

Dari Tabel 6 dan Tabel 7 nampak bahwa Rasio Jenis Kelamin (RJK) atau *Sex Ratio* di Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 adalah 102,37 yang berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 100-103 orang penduduk laki-laki. Namun demikian, jika dilihat dari kelompok umur menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan cenderung lebih besar berada pada kelompok umur 45 tahun ke atas. Hal ini diduga disebabkan penduduk laki-laki lebih banyak yang bermigrasi dibandingkan dengan penduduk perempuannya. Sedangkan jika dilihat pada kelompok umur

0-4 tahun sebesar 107,79 yang artinya terdapat 107-108 balita berjenis kelamin laki-laki dari 100 balita perempuan. Secara biologis jumlah kelahiran bayi laki-laki pada umumnya lebih besar dibanding dengan kelahiran bayi perempuan, namun bayi laki-laki lebih rentan terhadap kematian dibanding bayi perempuan. Rasio jenis kelamin pada kelompok umur diatas 60 tahun juga menunjukkan penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Ini menunjukkan bahwa teori yang mengatakan bahwa umur harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki adalah benar, karena secara biologis umur harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki.

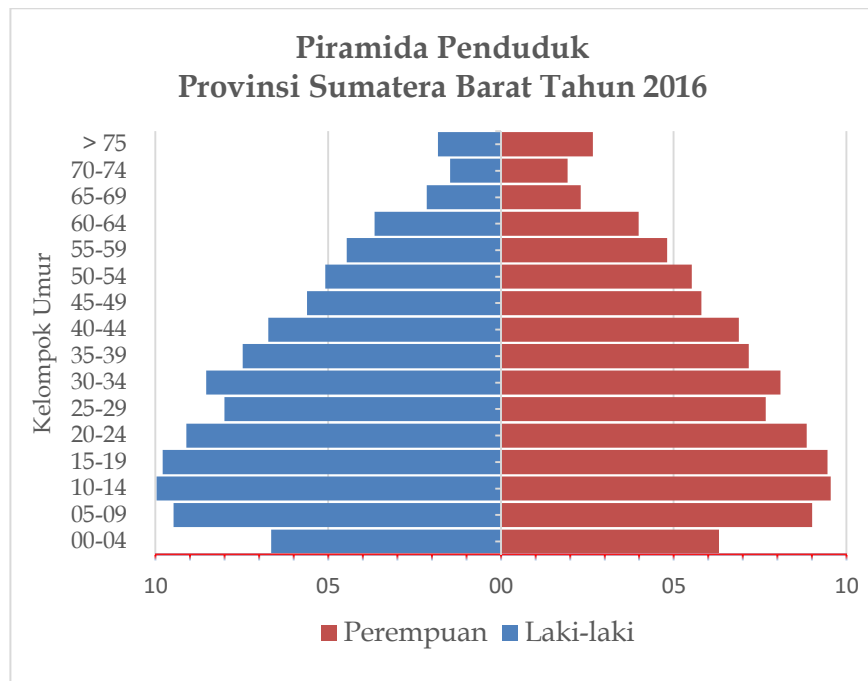
c) Piramida Penduduk

Piramida penduduk menunjukkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang disajikan secara grafik. Sumbu horizontal (dasar piramida penduduk) menunjukkan jumlah penduduk dapat menggunakan jumlah absolut atau persentase. Sumbu vertikal menunjukkan umur, baik menurut kelompok umur satu tahunan maupun lima tahunan. Dasar piramida dimulai dengan kelompok umur termuda dan dilanjutkan ke atas untuk kelompok umur yang lebih tua dan biasanya puncak piramida untuk kelompok umur yang lebih tua sering dibuat dengan sistem umur terbuka (75+) dan bagian kiri piramida digunakan untuk mewakili penduduk laki-laki serta bagian kanan untuk penduduk perempuan.

Piramida penduduk merupakan refleksi struktur umur penduduk menurut jenis kelamin dimana bentuknya

ditentukan oleh kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan perpindahan penduduk (mobilitas).

Piramida Penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini :



Gambar 2. Piramida Penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

Menurut bentuknya, piramida penduduk Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun 2016 dinamakan “Piramida penduduk dengan bentuk “kendi”. Piramida bentuk ini biasa terdapat pada daerah/negara yang mengalami penurunan tingkat kelahiran secara drastis dengan tingkat kematian bayi yang semakin menurun.

Sedangkan berdasarkan cirinya, Piramida Penduduk Sumatera Barat Tahun 2016 dinamakan Konstriktif (*Constrictive*), dimana bagian dasar piramida kecil dan sebagian besar penduduk masih berada dalam kelompok umur muda.

Piramida penduduk ini dapat digunakan untuk membuat perencanaan pembangunan dengan memperhatikan umur dan jenis kelamin secara cepat dan juga berguna untuk evaluasi data kependudukan yang dikumpulkan. Piramida yang disajikan dari periode-periode yang lain dapat menunjukkan perkembangan dan kecenderungan penduduk di masa lalu, saat ini dan masa yang akan datang. Dengan melihat gambar piramida penduduk, kita dapat mengetahui struktur umur penduduk dan implikasinya terhadap tuntutan penyediaan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kebutuhan dasar penduduk (baik balita, remaja, dewasa, laki-laki, perempuan dan lansia) sekaligus melihat potensi tenaga kerja serta membayangkan kebutuhan akan tambahan kesempatan kerja yang harus diciptakan.

Berdasarkan Piramida Penduduk Sumatera Barat Tahun 2016, dapat dilihat bahwa struktur umur penduduk Sumatera Barat saat ini didominasi oleh penduduk usia muda, terutama penduduk pada usia 10-14 tahun, sehingga penyediaan pelayanan pendidikan agar dapat lebih ditingkatkan. Komposisi ini juga menunjukkan bahwa kedepan nanti, penduduk Sumatera Barat sedang mengarah pada struktur penduduk usia produktif sehingga perlu disiapkan ketersediaan atas tambahan kesempatan kerja yang harus diciptakan.

Pada piramida ini juga terlihat bahwa jumlah penduduk kelompok umur 0-4 tahun yang terletak pada dasar piramida mulai mengecil. Ini berarti angka kelahiran mulai menurun. Demikian juga dengan jumlah penduduk 5-9 tahun masih

terlihat lebar, berarti lima tahun ke depan dibutuhkan fasilitas pendidikan dasar dan menengah yang cukup untuk menampung penduduk kelompok ini.

Penduduk lansia (65 tahun ke atas), menunjukkan proporsi yang masih kecil yaitu 6,16 persen pada tahun 2016. Namun dimasa depan proporsi penduduk lansia akan terus merambat naik, karena pergeseran umur penduduk serta usia harapan hidup yang semakin meningkat. Pertambahan jumlah penduduk lansia ini harus mulai diantisipasi dari sekarang, karena kelompok ini akan terus membesar di masa depan, sehingga diperlukan kebijakan seperti ketenagakerjaan, kesehatan, pelayanan lansia serta kebutuhan sosial dasar lainnya.

d) Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*)

Rasio ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif (15-64 tahun) terhadap penduduk tidak produktif (< 15 tahun dan 65 tahun ke atas). Semakin tinggi persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Demikian pula penduduk berusia 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas

dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Rasio ketergantungan ini merupakan indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah.

Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 8, di bawah ini :

Tabel 8.
 Rasio Ketergantungan Berdasarkan Kelompok Umur
 Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

KELOMPOK UMUR	Jenis Kelamin (Jiwa)		Total (Jiwa)	% Total	Dependency Ratio
	Laki-Laki	Perempuan			
0-14 tahun (Umur Muda)	719.770	670.023	1.389.793	24,87	37,30
15-64 tahun (Umur Produktif)	1.887.988	1.838.458	3.726.446	68,24	100,00
> 65 tahun (Umur Tua)	150.285	185.750	336.035	6,89	9,02
JUMLAH	2.758.043	2.694.231	5.452.274	100,00	

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2016 (diolah)

Dari tabel 8 di atas diketahui bahwa rasio ketergantungan total Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 adalah sebesar 46,32 persen, artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif (usia kerja) mempunyai beban tanggungan sebanyak 46 sampai 47 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan sebesar 46,32 persen ini terdiri dari rasio penduduk muda sebesar 37,30 persen dan rasio penduduk tua sebesar 9,02 persen.

Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kesempatan kerja, kualitas penduduk dan tetap mempertahankan laju pertumbuhan penduduk yang rendah.

3) Rasio Kepadatan Penduduk (*Population Density Ratio*)

Kepadatan penduduk merupakan kondisi yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun karena perubahan jumlah penduduk di satu wilayah/area, baik secara alami maupun karena perpindahan penduduk dari daerah satu ke daerah lainnya. Indikator kepadatan penduduk berguna untuk melihat kerapatan jumlah penduduk dalam satu satuan keruangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 56/PRP/1960, ada 4 (empat) klasifikasi kepadatan penduduk yaitu tidak padat, dengan tingkat kepadatan 1-50 jiwa per kilometer persegi, kurang padat dengan tingkat kepadatan 51-250 jiwa per kilometer persegi, cukup padat dengan tingkat kepadatan 251-400 jiwa per kilometer persegi dan sangat padat dengan tingkat kepadatan lebih besar dari 401 jiwa/kilometer persegi.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Provinsi Sumatera Barat tergolong provinsi yang kurang padat, hal ini dapat dilihat pada Tabel 9 di bawah ini. Tabel 9 memperlihatkan rasio kepadatan penduduk di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016. Dengan luas 42.012 kilometer persegi, Provinsi Sumatera Barat didiami oleh penduduk sebesar 5.452.274 jiwa atau dengan kepadatan sebesar 129,78 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2016. Dengan kata lain rata-rata setiap kilometer persegi Provinsi Sumatera Barat didiami sebanyak 129 sampai dengan 130 jiwa.

Dari Tabel 9 juga terlihat bahwa rasio kepadatan penduduk tertinggi di Provinsi Sumatera Barat berada di Kota Bukittinggi dengan luas wilayah hanya 25 kilometer persegi didiami oleh penduduk sebanyak 115.639 jiwa dan rasio kepadatan penduduk terendah berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan luas wilayah 6.011 kilometer persegi didiami oleh penduduk hanya sebanyak 83.267 jiwa.

Tabel 9.
Rasio Kepadatan Penduduk Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016

NO	KABUPATEN/KOTA	PENDUDUK (JIWA)	LUAS WILAYAH (Km ²)	KEPADATAN (Jiwa/Km ²)
1	Kabupaten Pesisir Selatan	516.719	5.750	89,86
2	Kabupaten Solok	374.676	3.738	100,23
3	Kabupaten Sijunjung	232.749	3.130	74,36
4	Kabupaten Tanah Datar	365.040	1.336	273,23
5	Kabupaten Padang Pariaman	460.742	1.333	345,64
6	Kabupaten Agam	523.335	1.804	290,10
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	372.949	3.571	104,44
8	Kabupaten Pasaman	314.530	3.948	79,67
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	83.267	6.011	13,85
10	Kabupaten Dharmasraya	204.149	2.961	68,95
11	Kabupaten Solok Selatan	176.931	3.346	52,88
12	Kabupaten Pasaman Barat	427.358	3.888	109,92
13	Kota Padang	881.128	694	1.269,64
14	Kota Solok	67.942	71	956,93
15	Kota Sawahlunto	64.106	232	276,32
16	Kota Padang Panjang	52.935	23	2.301,52
17	Kota Bukittinggi	115.639	25	4.625,56
18	Kota Payakumbuh	129.362	85	1.521,91
19	Kota Pariaman	88.717	66	1.344,20
	SUMATERA BARAT	5.452.274	42.012	129,78

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2016 (diolah)

4) *Angka Pertumbuhan Penduduk*

Angka pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menggambarkan penambahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah maupun migrasi penduduk. Indikator laju pertumbuhan penduduk berguna untuk melihat kecenderungan dan memproyeksikan jumlah penduduk di masa depan.

Angka Pertumbuhan penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 disajikan pada Tabel 10 berikut ini :

Tabel 10.
Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016

NO	KABUPATEN/KOTA	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Pertumbuhan Penduduk
		2015	2016	
1	Kabupaten Pesisir Selatan	514.383	516.719	0,45
2	Kabupaten Solok	372.269	374.676	0,65
3	Kabupaten Sijunjung	230.865	232.749	0,82
4	Kabupaten Tanah Datar	362.759	365.040	0,63
5	Kabupaten Padang Pariaman	458.746	460.742	0,44
6	Kabupaten Agam	519.756	523.335	0,69
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	368.335	372.949	1,25
8	Kabupaten Pasaman	312.631	314.530	0,61
9	Kabupaten Kep. Mentawai	80.877	83.267	2,96
10	Kabupaten Dharmasraya	202.076	204.149	1,03
11	Kabupaten Solok Selatan	175.513	176.931	0,81
12	Kabupaten Pasaman Barat	425.463	427.358	0,45
13	Kota Padang	873.493	881.128	0,87
14	Kota Solok	65.167	67.942	4,26
15	Kota Sawahlunto	62.112	64.106	3,21
16	Kota Padang Panjang	51.224	52.935	3,34
17	Kota Bukittinggi	113.883	115.639	1,54
18	Kota Payakumbuh	127.126	129.362	1,76
19	Kota Pariaman	86.384	88.717	2,70
SUMATERA BARAT		5.403.062	5.452.274	0,91

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2016 (diolah)

Bila dilihat pada tabel, angka pertumbuhan penduduk Provinsi Sumatera Barat dari Tahun 2015 ke Tahun 2016 termasuk rendah, karena hanya bertambah sebesar 0,91 persen. Angka pertumbuhan penduduk ini dihitung berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) hasil pembersihan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang telah diintegrasikan dengan data hasil perekaman KTP Elektronik. Pertumbuhan Penduduk yang rendah ini sangat menguntungkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, karena apabila pertumbuhan penduduk tidak terkendali, maka implikasi dari hal tersebut adalah munculnya berbagai masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan, pertumbuhan daerah kumuh, kriminalitas dan lain sebagainya. Angka pertumbuhan penduduk di atas dipengaruhi oleh masih terdapatnya data ganda antar Kabupaten/Kota se-Indonesia yang terdeteksi oleh Tim Konsolidasi Data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sehingga banyak data ganda yang harus dihapus dari database kependudukan Kabupaten/Kota.

b. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial

1) Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Bagian ini menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan jenjang pendidikan terakhir yang ditamatkan di suatu provinsi pada waktu tertentu yang disajikan berdasarkan jenis kelamin dalam bentuk tabel.

Informasi tentang jumlah penduduk menurut pendidikan ini menunjukkan karakteristik penduduk berdasarkan jenjang

pendidikan dan gambaran pencapaian pembangunan pendidikan di suatu Kabupaten/Kota.

Tingkat pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan semakin baik kualitas SDM di wilayah tersebut. Namun ukuran ini masih harus ditambah dengan etos kerja dan keterampilan baik *hard skill* maupun *soft skill*. Beberapa pelaku usaha menyatakan bahwa yang dibutuhkan tidak saja keterampilan tetapi juga kepribadian, karena keterampilan bisa ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan.

Tamat sekolah didefinisikan sebagai jenjang pendidikan yang telah berhasil diselesaikan oleh seseorang dengan dibuktikan adanya ijazah atau surat tanda tamat belajar. Tetapi jika menggunakan ukuran menurut jenjang tertinggi merupakan jenjang atau kelas tertinggi yang pernah ditempuh oleh seseorang maka tentunya hasilnya akan berbeda dengan definisi di atas. Namun demikian, dalam struktur database, ketepatan pelaporan atau kejujuran masyarakat juga sangat menentukan dalam pengklasifikasian distribusi penduduk menurut tingkat pendidikan ini. Oleh sebab itu sangat diharapkan sekali masyarakat agar melaporkan data-data yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sehingga database yang terbentuk menjadi akurat dan berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Tabel distribusi penduduk menurut pendidikan yang ditamatkan dan jenis kelamin Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 11 berikut ini :

Tabel 11.
Distribusi Penduduk Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan
Dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin (Jiwa)				Total (Jiwa)	
	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	%
	Jumlah	%	Jumlah	%		
Tidak/Belum Sekolah	576.073	20,89	546.597	20,29	1.122.691	20,59
Belum Tamat SD/Sederajat	467.604	16,95	443.655	16,47	911.276	16,71
Tamat SD/Sederajat	571.882	20,74	572.093	21,23	1.143.996	20,98
SLTP/Sederajat	428.621	15,54	389.047	14,44	817.684	15,00
SLTA/Sederajat	572.262	20,75	533.061	19,79	1.105.344	20,27
Diploma I/II	11.705	0,42	31.119	1,16	42.824	0,79
Akademi/Diploma III/Sarmud	29.392	1,07	50.134	1,86	79.527	1,46
Diploma IV/Strata I	91.509	3,32	121.408	4,51	212.920	3,91
Strata II	8.158	0,30	6.648	0,25	14.806	0,27
Strata III	837	0,03	469	0,02	1.306	0,02
JUMLAH	2.758.043	100,00	2.694.231	100,00	5.452.374	100,00

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2016 (diolah)

Dari Tabel 11 terlihat bahwa penduduk Provinsi Sumatera Barat 20,27 persen berpendidikan SLTA/ sederajat. Persentase penduduk perempuan yang berpendidikan SLTA sedikit lebih rendah dibandingkan dengan penduduk laki-laki yang berpendidikan SLTA. Hal ini mencerminkan bahwa partisipasi penduduk perempuan untuk bersekolah lebih rendah dibandingkan penduduk laki-laki. Permintaan pasar tenaga kerja yang mensyaratkan minimal pendidikan SLTA, menyebabkan penduduk berusaha untuk mencapai jenjang pendidikan

tersebut untuk bisa masuk ke pasar kerja non pertanian. Sedangkan persentase penduduk yang tamat SLTP untuk perempuan lebih rendah dibandingkan dengan persentase penduduk laki-laki. Pada jenjang pendidikan dasar, persentase penduduk yang tamat SD untuk penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penduduk laki-laki. Demikian juga halnya untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi, persentase penduduk perempuan yang tamat Diploma I/II, Akademi/Diploma III/Sarmud, dan Diploma IV/Strata I lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Hanya untuk tingkat pendidikan Strata II dan Strata III, jumlah penduduk laki-laki yang menamatkannya lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perempuan.

Ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam mengenyam pendidikan telah berkembang dengan baik di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, dimana diharapkan tidak terjadi lagi kesenjangan pendidikan antara penduduk laki-laki dengan perempuan. Jika penduduk perempuan mempunyai pendidikan yang tinggi tentunya ketergantungan terhadap laki-laki bisa sedikit ditekan dan tentunya keinginan untuk bertahan hidup akan semakin tinggi bagi penduduk perempuan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu memperhatikan kondisi diatas mengingat bahwa era globalisasi sebentar lagi akan berlangsung dan persaingan untuk memperoleh pekerjaan semakin ketat dimana warga negara asing pun bisa mencari pekerjaan ke Indonesia. Peningkatan pendidikan *vocasional*, akses ke pendidikan terutama untuk penduduk miskin, perlu

dilakukan mengingat bahwa sebagian besar peluang kerja membutuhkan tenaga terdidik yang memiliki keterampilan khusus.

2) *Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan*

Bagian ini menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan agama di suatu provinsi pada waktu tertentu yang disajikan per Kabupaten/Kota dalam bentuk tabel maupun gambar. Dari tabel dan gambar tersebut akan diketahui karakteristik penduduk berdasarkan pemeluk agama (Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Khonghucu, dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa).

Informasi tentang jumlah penduduk berdasarkan agama ini diperlukan untuk merencanakan suatu program kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama. Dari Tabel 12 dapat dilihat bahwa penduduk Provinsi Sumatera Barat pada umumnya memeluk agama Islam sebanyak 97,67 persen, disusul kemudian pemeluk agama Kristen 1,43 persen, Katholik 0,83 persen. Sedangkan penganut agama Hindu hanya 109 orang (0 persen), Budha 3.765 orang (0,07 persen), Konghucu hanya 8 orang (0 persen), dan Kepercayaan sebanyak 240 orang (0 persen).

Jika dikaitkan dengan wilayah Kabupaten/Kota, sebagaimana terlihat pada Tabel 13, maka agama Islam mendominasi di 18 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Hanya Kabupaten Kepulauan Mentawai yang didominasi oleh agama Kristen dan Katholik. Agama kedua terbesar setelah Islam yang tersebar disetiap Kabupaten/Kota adalah agama Kristen. Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Padang merupakan

wilayah dengan agama Kristen dan Katholik terbesar yaitu 41.852 jiwa penganut Kristen di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan 13.722 jiwa di Kota Padang. Penganut Katholik sebanyak 24.331 jiwa di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan 12.904 jiwa di Kota Padang. Selain itu, Kota Padang juga merupakan wilayah dengan penganut agama Hindu dan Budha terbesar di seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Distribusi Penduduk menurut agama dan jenis kelamin Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 tersaji pada Tabel 12 di bawah ini :

Tabel 12.
Distribusi Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

AGAMA	JENIS KELAMIN (JIWA)				TOTAL (JIWA)	
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		Jumlah	%
	Jumlah	%	Jumlah	%		
Islam	2.692.277	97,69	2.632.693	97,79	5.324.970	97,67
Kristen	40.745	1,48	37.442	1,39	78.187	1,43
Katholik	22.884	0,83	22.111	0,82	44.995	0,83
Hindu	57	0,00	52	0,00	109	0,00
Budha	1.944	0,07	1.821	0,07	3.765	0,07
Konghucu	5	0,00	3	0,00	8	0,00
Kepercayaan	131	0,00	109	0,00	240	0,00
JUMLAH	2.755.963	100,00	2.692.298	100,00	5.452.274	100,00

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2016 (diolah)

Sedangkan distribusi penduduk menurut agama dan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 13 berikut ini :

PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

2016

NO	KABUPATEN/KOTA	AGAMA (JIWA)														TOTAL (JIWA)	
		Islam		Kristen		Katholik		Hindu		Budha		Konghucu		Kepercayaan		Jumlah	%
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%				
1	Kabupaten Pesisir Selatan	515.841	9,69	673	0,86	196	0,44	9	8,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00	516.719	9,48
2	Kabupaten Solok	374.292	7,03	358	0,46	22	0,05	4	3,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	374.676	6,87
3	Kabupaten Sijunjung	231.546	4,35	889	1,14	295	0,66	10	9,17	2	0,05	0	0,00	7	2,92	232.749	4,27
4	Kabupaten Tanah Datar	364.544	6,85	357	0,46	117	0,26	1	0,92	20	0,53	0	0,00	1	0,42	365.040	6,70
5	Kabupaten Padang Pariaman	458.988	8,62	1.320	1,69	420	0,93	5	4,59	7	0,19	0	0,00	2	0,83	460.742	8,45
6	Kabupaten Agam	519.065	9,75	3.940	5,04	302	0,67	11	10,09	17	0,45	0	0,00	0	0,00	523.335	9,60
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	372.306	6,99	418	0,53	225	0,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	372.949	6,84
8	Kabupaten Pasaman	313.120	5,88	1.278	1,63	131	0,29	1	0,92	0	0,00	0	0,00	0	0,00	314.530	5,77
9	Kabupaten Kep. Mentawai	16.954	0,32	41.852	53,53	24.331	54,07	0	0,00	0	0,00	0	0,00	130	54,17	83.267	1,53
10	Kabupaten Dharmasraya	202.298	3,80	1.516	1,94	321	0,71	0	0,00	2	0,05	0	0,00	12	5,00	204.149	3,74
11	Kabupaten Solok Selatan	175.899	3,30	858	1,10	168	0,37	3	2,75	0	0,00	0	0,00	3	1,25	176.931	3,25
12	Kabupaten Pasaman Barat	417.164	7,83	7.261	9,29	2.895	6,43	5	4,59	8	0,21	0	0,00	25	10,42	427.358	7,84
13	Kota Padang	851.082	15,98	13.722	17,55	12.904	28,68	52	47,71	3.311	87,94	7	87,50	50	20,83	881.128	16,16
14	Kota Solok	67.237	1,26	454	0,58	246	0,55	0	0,00	5	0,13	0	0,00	0	0,00	67.942	1,25
15	Kota Sawahlunto	63.747	1,20	247	0,32	112	0,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	64.106	1,18
16	Kota Padang Panjang	52.133	0,98	374	0,48	367	0,82	0	0,00	60	1,59	1	12,50	0	0,00	52.935	0,97
17	Kota Bukittinggi	112.569	2,11	1.735	2,22	1.137	2,53	7	6,42	186	4,94	0	0,00	5	2,08	115.639	2,12
18	Kota Payakumbuh	127.811	2,40	719	0,92	684	1,52	1	0,92	147	3,90	0	0,00	0	0,00	129.362	2,37
19	Kota Pariaman	88.374	1,66	216	0,28	122	0,27	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	2,08	88.717	1,63
	SUMATERA BARAT	5.324.970	100,00	78.187	100,00	44.995	100,00	109	100,00	3765	100,00	8	100,00	240	100,00	5.452.274	100,00

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2016 (diolah)

Tabel 13. Distribusi Penduduk menurut Agama dan Kabupaten/Kota, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

3) Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kecacatan

Bagian ini menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan jenis kecacatan (tuna netra, tuna rungu, tuna grahita, dan lain-lain) yang disajikan dalam bentuk tabel.

Data ini sangat diperlukan dalam melakukan perencanaan pelayanan yang akan diberikan kepada penduduk dengan kategori khusus.

Indikator ini menguraikan jumlah dan proporsi penyandang cacat dirinci menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Masing-masing disajikan dalam bentuk tabel menurut Kabupaten/Kota.

Distribusi penduduk Provinsi Sumatera Barat menurut jenis kecacatan dan jenis kelamin tahun 2016 disajikan pada Tabel 14, sedangkan distribusi penduduk Provinsi Sumatera Barat menurut jenis kecacatan dan Kabupaten/Kota tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 14.
Distribusi Penduduk Menurut Jenis Kecacatan dan Jenis Kelamin
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

NO	JENIS KECACATAN	JENIS KELAMIN (JIWA)				TOTAL (JIWA)	
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN		Jumlah	%
		Jumlah	%	Jumlah	%		
1	Cacat Fisik	666	24,28	469	23,71	1.135	24,04
2	Cacat Netra/Buta	262	9,55	199	10,06	461	9,76
3	Cacat Rungu/Wicara	467	17,03	444	22,45	911	19,30
4	Cacat Mental/Jiwa	786	28,65	448	22,65	1.234	26,14
5	Cacat Fisik dan Mental	328	11,96	247	12,49	575	12,18
6	Cacat Lainnya	234	8,53	171	8,65	405	8,58
	JUMLAH	2.743	100,00	1.978	100,00	4.721	100,00

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2016 (diolah)

Dari tabel di atas diketahui bahwa penyandang cacat di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 4.721 jiwa dengan jenis kecacatan yang paling banyak dialami adalah cacat mental/jiwa sebanyak 1.234 jiwa (26,14 persen) dengan persentase tertinggi pada laki-laki sebanyak 786 jiwa (28,65 persen).

Bila dilihat pada Tabel 15, maka distribusi penyandang cacat per Kabupaten/Kota terbanyak berada di Kota Padang dengan jumlah total 919 jiwa (19,47 persen), diikuti oleh Kabupaten Tanah Datar dengan penyandang cacat sebanyak 651 jiwa (13,79 persen), sedangkan penyandang cacat dengan jumlah terkecil berada di Kota Payakumbuh hanya sebanyak 10 jiwa (0,21 persen). Untuk jenis kecacatan yang paling banyak dialami penduduk Provinsi Sumatera Barat, yaitu cacat mental/jiwa, Kabupaten/Kota yang terbanyak juga Kota Padang dengan jumlah sebanyak 213 jiwa (17,26 persen) dan selanjutnya juga Kabupaten Tanah Datar sebanyak 209 jiwa (16,94 persen), sedangkan jumlah penyandang cacat mental/jiwa terkecil juga berada di Kota Payakumbuh yaitu sebanyak 2 orang (0,16 persen).

Dari Tabel 15 juga dapat dilihat bahwa untuk masing-masing jenis kecacatan yaitu cacat fisik, jumlah terbesar berada di Kota Padang sebanyak 203 jiwa (17,89 persen) dan jumlah terkecil berada di Kota Payakumbuh sebanyak 2 jiwa (0,18 persen), cacat netra (buta) jumlah terbesar berada di Kabupaten Pasaman dengan jumlah 73 jiwa (15,84 persen) dan jumlah terkecil berada di Kota Payakumbuh sebanyak 2 orang (0,43 persen), cacat rungu (wicara) jumlah terbesar berada di Kota Padang sebanyak 202 jiwa (22,17 persen) dan jumlah terkecil berada di Kota

Payakumbuh sebanyak 2 jiwa (0,22 persen), cacat fisik dan mental jumlah terbesar berada di kota Padang sebanyak 101 jiwa (17,57 persen) dan jumlah terkecil berada di Kota Payakumbuh sebanyak 1 orang (0,17 persen), dan cacat lainnya jumlah terbesar juga berada di Kota Padang sebanyak 137 jiwa (33,83 persen) dan jumlah terkecil sebanyak 1 orang (0,25 persen) juga berada di Kota Payakumbuh.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa hampir semua jenis kecacatan, jumlah terbesarnya berada di Kota Padang, hanya cacat netra (buta) yang berada di Kabupaten Pasaman dan jumlah terkecil berada di Kota Payakumbuh. Hal ini menuntut perhatian yang serius dari Pemerintah Kota Padang untuk dapat memperhatikan dan menyiapkan sarana dan prasarana penunjang bagi penduduk penyandang cacat (disabilitas) ini, khususnya untuk pelayanan publik di berbagai sektor agar seluruh penduduk disabilitas ini mendapatkan prioritas pelayanan. Selanjutnya, pemerintah Kota Padang juga harus menyediakan Rumah Sakit khusus bagi penyandang cacat ini agar seluruh penyandang cacat bisa mendapatkan pelayanan yang optimal.

PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

2016

NO	KABUPATEN/KOTA	JENIS KECACATAN (JIWA)												TOTAL (JIWA)	
		Cacat Fisik		Cacat Netra/Buta		Cacat Rungu/Wicara		Cacat Mental/Jiwa		Cacat Fisik & Mental		Cacat Lainnya			
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Kabupaten Pesisir Selatan	56	4,93	16	3,47	34	3,73	46	3,73	18	3,13	22	5,43	192	4,07
2	Kabupaten Solok	64	5,64	30	6,51	39	4,28	79	6,40	43	7,48	17	4,20	272	5,76
3	Kabupaten Sijunjung	67	5,90	39	8,46	76	8,34	47	3,81	43	7,48	24	5,93	296	6,27
4	Kabupaten Tanah Datar	169	14,89	51	11,06	114	12,51	209	16,94	79	13,74	29	7,16	651	13,79
5	Kabupaten Padang Pariaman	39	3,44	16	3,47	24	2,63	42	3,40	22	3,83	4	0,99	147	3,11
6	Kabupaten Agam	144	12,69	37	8,03	52	5,71	156	12,64	49	8,52	25	6,17	463	9,81
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	21	1,85	11	2,39	20	2,20	40	3,24	11	1,91	11	2,72	114	2,41
8	Kabupaten Pasaman	120	10,57	73	15,84	124	13,61	145	11,75	70	12,17	17	4,20	549	11,63
9	Kabupaten Kep. Mentawai	20	1,76	6	1,30	10	1,10	15	1,22	8	1,39	7	1,73	66	1,40
10	Kabupaten Dharmasraya	17	1,50	9	1,95	30	3,29	15	1,22	14	2,43	10	2,47	95	2,01
11	Kabupaten Solok Selatan	18	1,59	11	2,39	28	3,07	15	1,22	19	3,30	3	0,74	94	1,99
12	Kabupaten Pasaman Barat	47	4,14	28	6,07	37	4,06	57	4,62	26	4,52	32	7,90	227	4,81
13	Kota Padang	203	17,89	63	13,67	202	22,17	213	17,26	101	17,57	137	33,83	919	19,47
14	Kota Solok	29	2,56	11	2,39	34	3,73	28	2,27	9	1,57	10	2,47	121	2,56
15	Kota Sawahlunto	39	3,44	12	2,60	44	4,83	42	3,40	27	4,70	31	7,65	195	4,13
16	Kota Padang Panjang	18	1,59	6	1,30	11	1,21	11	0,89	2	0,35	4	0,99	52	1,10
17	Kota Bukittinggi	12	1,06	16	3,47	5	0,55	19	1,54	5	0,87	10	2,47	67	1,42
18	Kota Payakumbuh	2	0,18	2	0,43	2	0,22	2	0,16	1	0,17	1	0,25	10	0,21
19	Kota Pariaman	50	4,41	24	5,21	25	2,74	53	4,29	28	4,87	11	2,72	191	4,05
	SUMATERA BARAT	1.135	100,00	461	100,00	911	100,00	1.234	100,00	575	100,00	405	100,00	4.721	100,00

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2016 (diolah)

Tabel 15. Distribusi Penduduk Menurut Jenis Kecacatan dan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

4) Penduduk Menurut Status Kawin

Bagian ini menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk menurut status kawin di suatu daerah pada waktu tertentu yang disajikan per wilayah dalam bentuk tabel. Status kawin ini meliputi belum kawin, kawin dan cerai.

Dalam hal ini, konsep perkawinan difokuskan pada keadaan dimana seorang laki-laki dan perempuan hidup bersama dalam jangka waktu yang lama secara sah (de jure) maupun tanpa pengesahan perkawinan (de facto).

Indikator perkawinan berguna bagi penentu kebijakan dalam mengembangkan program-program pembangunan keluarga dan upaya-upaya peningkatan kualitas keluarga dan perencanaan Keluarga Berencana/pembangunan keluarga.

Distribusi penduduk Provinsi Sumatera Barat menurut status kawin dan jenis kelamin tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 16 berikut ini :

Tabel 16.
Distribusi Penduduk Menurut Status Kawin dan Jenis Kelamin
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

STATUS KAWIN	JENIS KELAMIN (JIWA)				TOTAL (JIWA)	
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		Jumlah	%
	Jumlah	%	Jumlah	%		
Belum Kawin	1.524.709	55,28	1.235.987	45,88	2.760.751	50,63
Kawin	1.190.744	43,17	1.214.237	45,07	2.405.024	44,11
Cerai Hidup	14.672	0,53	45.168	1,68	59.841	1,10
Cerai Mati	27.918	1,01	198.839	7,38	226.758	4,16
JUMLAH	2.758.043	100,00	2.694.231	100,00	5.452.374	100,00

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2016 (diolah)

**PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

2016

No	KABUPATEN/KOTA	STATUS KAWIN (JIWA)								TOTAL (JIWA)	
		Belum Kawin		Kawin		Cerai Hidup		Cerai Mati		Jumlah	%
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%		
1	Kabupaten Pesisir Selatan	260.554	9,44	229.580	9,55	6.713	11,22	19.872	8,76	516.749	9,48
2	Kabupaten Solok	191.001	6,92	164.096	6,82	2.730	4,56	16.849	7,43	374.694	6,87
3	Kabupaten Sijunjung	113.892	4,13	108.314	4,50	1.962	3,28	8.581	3,78	232.761	4,27
4	Kabupaten Tanah Datar	173.647	6,29	167.078	6,95	4.597	7,68	19.718	8,70	365.061	6,70
5	Kabupaten Padang Pariaman	248.129	8,99	183.429	7,63	6.953	11,62	22.231	9,80	460.770	8,45
6	Kabupaten Agam	269.334	9,76	219.382	9,12	6.570	10,98	28.049	12,37	523.365	9,60
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	173.193	6,27	179.323	7,46	3.629	6,06	16.804	7,41	372.969	6,84
8	Kabupaten Pasaman	165.159	5,98	132.481	5,51	2.988	4,99	13.902	6,13	314.546	5,77
9	Kabupaten Kep. Mentawai	45.394	1,64	35.613	1,48	454	0,76	1.806	0,80	83.271	1,53
10	Kabupaten Dharmasraya	96.121	3,48	100.512	4,18	1.467	2,45	6.049	2,67	204.159	3,74
11	Kabupaten Solok Selatan	88.157	3,19	81.595	3,39	1.907	3,19	5.272	2,32	176.941	3,25
12	Kabupaten Pasaman Barat	227.066	8,22	182.013	7,57	3.867	6,46	14.412	6,36	427.380	7,84
13	Kota Padang	447.301	16,20	392.820	16,33	9.283	15,51	31.724	13,99	881.176	16,16
14	Kota Solok	34.547	1,25	30.245	1,26	819	1,37	2.331	1,03	67.946	1,25
15	Kota Sawahlunto	30.716	1,11	29.194	1,21	838	1,40	3.358	1,48	64.110	1,18
16	Kota Padang Panjang	27.049	0,98	22.947	0,95	779	1,30	2.160	0,95	52.938	0,97
17	Kota Bukittinggi	58.218	2,11	51.620	2,15	1.403	2,34	4.398	1,94	115.646	2,12
18	Kota Payakumbuh	63.303	2,29	59.602	2,48	1.634	2,73	4.823	2,13	129.370	2,37
19	Kota Pariaman	47.915	1,74	35.137	1,46	1.247	2,08	4.418	1,95	88.722	1,63
	SUMATERA BARAT	2.760.696	100,00	2.404.981	100,00	59.840	100,00	226.757	100,00	5.452.574	100,00

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II 2016 (diolah)

Tabel 17. Distribusi Penduduk Menurut Status Kawin dan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

Tabel 16 menunjukkan bahwa penduduk Provinsi Sumatera Barat didominasi oleh penduduk berstatus belum kawin pada tahun 2016 berjumlah 2.760.751 jiwa (50,63 persen). Hal ini terlihat, baik untuk penduduk laki-laki maupun perempuan. Sementara itu, proporsi penduduk laki-laki yang berstatus kawin hampir sama dengan perempuan. Sedangkan, penduduk laki-laki berstatus belum kawin lebih tinggi dibandingkan perempuan, karena biasanya laki-laki masih meneruskan pendidikan atau baru mulai bekerja, sehingga menunda perkawinan. Begitu juga laki-laki yang dikonstruksikan sebagai kepala keluarga yang harus membiayai kebutuhan keluarga, mempunyai keinginan mapan secara ekonomi sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Proporsi penduduk dengan status cerai hidup dan cerai mati lebih tinggi pada perempuan dibandingkan laki-laki. Hal ini disebabkan laki-laki yang bercerai baik karena perceraian maupun karena ditinggal meninggal istri lebih cepat melakukan perkawinan kembali dibandingkan perempuan. Perempuan lebih banyak pertimbangan untuk menikah kembali terutama apabila perempuan tersebut mandiri secara ekonomi. Proporsi penduduk berstatus cerai hidup lebih besar pada perempuan daripada laki-laki. Kemandirian perempuan secara ekonomi serta peningkatan kesadaran tentang hak-hak perempuan dalam rumah tangga, seringkali menjadi penyebab keberanian perempuan menggugat cerai. Banyaknya proporsi belum kawin diduga disebabkan oleh besarnya jumlah penduduk yang berada pada umur sekolah ditambah dengan mereka yang berstatus bekerja.

Jika diklasifikasikan berdasarkan Kabupaten/Kota, pada Tabel 17 dapat dilihat bahwa Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk berstatus kawin dengan persentase tertinggi ada pada Kota Padang dengan jumlah 392.820 jiwa (16,33 persen), diikuti Kabupaten Pesisir Selatan dengan jumlah 229.580 jiwa (9,55 persen), sedangkan Kabupaten/Kota dengan persentase terendah ada pada Kota Padang Panjang dengan jumlah 22.947 jiwa (0,95 persen), diikuti Kota Sawahlunto dengan jumlah 29.194 jiwa (1,21 persen).

Sedangkan untuk Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk cerai hidup dan cerai mati dengan persentase tertinggi juga ada pada Kota Padang dengan jumlah masing-masing 9.283 jiwa (15,51 persen) untuk cerai hidup dan sebanyak 31.724 (13,99 persen) untuk cerai mati.

c. Keluarga

Informasi tentang jumlah keluarga dan komposisi anggota keluarga, diperlukan dalam perencanaan maupun implementasi kebijakan pemenuhan pelayanan dasar, seperti Pendidikan, kesehatan, perumahan, kebutuhan pangan, pengentasan kemiskinan, dan sebagainya.

Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan sebagainya. Keluarga dapat dibagi menjadi 2 tipe yaitu :

- Keluarga Inti (*Nuclear family*), yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak kandung, anak angkat maupun adopsi

yang belum kawin, atau ayah dengan anak-anak yang belum kawin atau ibu dengan anak-anak yang belum kawin.

- Keluarga Luas (*Extended family*), adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak-anak baik yang sudah kawin atau belum, cucu, orang tua, mertua maupun kerabat-kerabat yang menjadi tanggungan kepala keluarga.

Beberapa indikator yang diperlukan untuk menggambarkan kondisi keluarga antara lain :

1) *Jumlah Keluarga dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga*

Banyaknya jumlah anggota keluarga dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi lingkungan dan kesejahteraan dalam satu keluarga, dimana diasumsikan semakin kecil jumlah anggota keluarga biasanya akan semakin baik tingkat kesejahteraannya.

Rata-rata jumlah anggota keluarga biasanya digunakan untuk melihat perubahan paradigma dari keluarga luas menjadi keluarga kecil.

Pada Tabel 18 dapat dilihat bahwa jumlah keluarga di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016 sebanyak 1.448.389 keluarga yang tersebar di 19 Kabupaten/Kota. Kota Padang sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Barat memiliki jumlah keluarga terbesar yaitu 232.971 keluarga kemudian disusul oleh Kabupaten Agam sebanyak 138.136 keluarga, Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 137.999 keluarga, dan Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 115.237 keluarga. Sedangkan jumlah keluarga terkecil berada di Kota Padang Panjang yaitu 14.239 keluarga.

Rata-rata jumlah anggota keluarga di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 3,75 per keluarga. Ini menunjukkan bahwa keluarga di Provinsi Sumatera Barat lebih banyak merupakan keluarga inti dengan jumlah anggota keluarga sebanyak 3-4 orang. Bila diperhatikan menurut Kabupaten/Kota, rata-rata jumlah anggota keluarga di setiap Kabupaten/Kota juga terdiri dari 3-4 orang per keluarga.

Tabel 18.
Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

No	Kabupaten/Kota	Penduduk (jiwa)		KK (JIWA)		Rata-rata Jiwa/KK
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Kabupaten Pesisir Selatan	516.719	9,48	137.999	9,48	3,74
2	Kabupaten Solok	374.676	6,87	98.455	6,77	3,81
3	Kabupaten Sijunjung	232.749	4,27	62.030	4,26	3,75
4	Kabupaten Tanah Datar	365.040	6,70	102.419	7,04	3,56
5	Kabupaten Padang Pariaman	460.742	8,45	115.237	7,92	4,00
6	Kabupaten Agam	523.335	9,60	138.316	9,51	3,78
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	372.949	6,84	110.070	7,56	3,39
8	Kabupaten Pasaman	314.530	5,77	83.723	5,75	3,76
9	Kabupaten Kep. Mentawai	83.267	1,53	20.953	1,44	3,97
10	Kabupaten Dharmasraya	204.149	3,74	55.916	3,84	3,65
11	Kabupaten Solok Selatan	176.931	3,25	48.036	3,30	3,68
12	Kabupaten Pasaman Barat	427.358	7,84	109.102	7,50	3,92
13	Kota Padang	881.128	16,16	232.971	16,01	3,78
14	Kota Solok	67.942	1,25	17.893	1,23	3,80
15	Kota Sawahlunto	64.106	1,18	18.421	1,27	3,48
16	Kota Padang Panjang	52.935	0,97	14.239	0,98	3,72
17	Kota Bukittinggi	115.639	2,12	31.714	2,18	3,65
18	Kota Payakumbuh	129.362	2,37	35.805	2,46	3,61
19	Kota Pariaman	88.717	1,63	21.823	1,50	4,07
	SUMATERA BARAT	5.452.274	100,00	1.455.122	100,00	3,75

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2016 (diolah)

Informasi tentang rata-rata jumlah anggota keluarga ini dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan program keluarga berencana di wilayah Provinsi Sumatera Barat dan dapat digunakan pemerintah provinsi dalam merencanakan kebutuhan

perumahan, seperti untuk menentukan ukuran rumah dengan berbagai tipe agar dapat memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat yang beranggota 3-4 orang.

2) *Status Hubungan Dengan Kepala Keluarga (SHDK)*

Hubungan dengan kepala keluarga digunakan untuk melihat banyaknya kepala keluarga menurut jenis kelamin, pola pengaturan tinggal Bersama (living arrangement) dan pola pengasuhan anak dalam keluarga tersebut. Setiap anggota dalam keluarga mempunyai status hubungan dengan kepala keluarga seperti suami, istri, anak, menantu, cucu, keponakan, orang tua, dan mertua, termasuk adanya orang lain yang tinggal Bersama seperti pembantu rumah tangga.

Tabel distribusi anggota keluarga berdasarkan status hubungan dengan kepala keluarga Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 19 di bawah ini :

Tabel 19.
Distribusi Anggota Keluarga Berdasarkan Status Hubungan Dengan Kepala Keluarga Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

No	Status Hubungan Dalam Keluarga	Laki-Laki (jiwa)		Perempuan (jiwa)		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
01	Kepala Keluarga	1.223.858	44,37	231.264	8,58	1.455.122	26,69
02	Suami	248	0,01	0	0,00	248	0,00
03	Istri	0	0,00	1.157.120	42,95	1.157.120	21,22
04	Anak	1.445.933	52,43	1.193.422	44,30	2.639.355	48,41
05	Menantu	854	0,03	328	0,01	1.182	0,02
06	Cucu	18.547	0,67	15.509	0,58	34.056	0,62
07	Orang Tua	2.474	0,09	19.203	0,71	21.677	0,40
08	Mertua	5.127	0,19	39.425	1,46	44.552	0,82
09	Famili Lain	56.147	2,04	34.088	1,27	90.235	1,65
10	Pembantu	92	0,00	228	0,01	320	0,01
11	Lainnya	4.763	0,17	3.644	0,14	8.407	0,15
	TOTAL	2.758.043	100,00	2.694.231	100,00	5.452.274	100,00

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2016 (diolah)

Dari Tabel 19 dapat kita ketahui bahwa status hubungan keluarga dengan kepala keluarga yang terbesar adalah anak sebanyak 2.639.355 jiwa (48,41 persen). Dari Tabel 19 juga terlihat bahwa terdapat jumlah Kepala Keluarga yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 231.264 jiwa (8,58 persen). Ini terjadi karena adanya perceraian baik cerai mati maupun cerai hidup yang akhirnya terpaksa menjadikan perempuan sebagai kepala keluarga.

3) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Umur

Informasi tentang kelompok umur dari kepala keluarga dan anggota keluarga penting diketahui terutama untuk melakukan analisis kondisi demografi keluarga serta perencanaan kebijakan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, kemiskinan, dan lain-lain.

Tabel kepala keluarga menurut umur dan jenis kelamin Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 20 di bawah. Pada Tabel 20 tersebut terlihat bahwa kepala keluarga terbesar jumlahnya berada pada kelompok umur 40-44 tahun yaitu sebanyak 187.398 jiwa (12,88 persen) dimana jumlah kepala keluarga laki-laki terbesar berada pada kelompok umur 35-39 tahun sebanyak 172.585 jiwa (14,10 persen) dan kepala keluarga perempuan terbesar berada pada kelompok umur 60-64 tahun sebanyak 32.621 jiwa (14,11 persen). Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kesempatan hidup perempuan lebih besar bila dibandingkan dengan laki-laki, dimana mulai pada kelompok umur 45-49, jumlah kepala keluarga perempuan mengalami peningkatan, sedangkan jumlah kepala keluarga laki-laki justru mengalami hal

sebaliknya dengan mengalami penurunan. Untuk itu perlu dipersiapkan perempuan-perempuan dengan ketrampilan-ketrampilan yang dapat menunjang kehidupannya dari sisi sosial, ekonomi, dan psikologi, kelak bila sudah tidak memiliki suami lagi, baik yang disebabkan karena cerai hidup maupun cerai mati.

Tabel 20.
Kepala Keluarga Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

No	Kelompok Umur	Laki-Laki (jiwa)		Perempuan (jiwa)		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	00-04	1	0,00	0	0,00	1	0,00
3	10-14	12	0,00	12	0,01	24	0,00
4	15-19	544	0,04	483	0,21	1.027	0,07
5	20-24	14.131	1,15	3.589	1,55	17.720	1,22
6	25-29	69.206	5,65	6.811	2,95	76.017	5,22
7	30-34	154.030	12,59	9.892	4,28	163.922	11,27
8	35-39	172.585	14,10	11.839	5,12	184.424	12,67
9	40-44	171.209	13,99	16.189	7,00	187.398	12,88
10	45-49	147.448	12,05	19.302	8,35	166.750	11,46
11	50-54	135.579	11,08	25.369	10,97	160.948	11,06
12	55-59	119.758	9,79	30.446	13,17	150.204	10,32
13	60-64	98.375	8,04	32.621	14,11	130.996	9,00
14	65-69	57.294	4,68	23.641	10,22	80.935	5,56
15	70-74	38.678	3,16	21.571	9,33	60.249	4,14
16	> 75	45.008	3,68	29.499	12,76	74.507	5,12
	Total	1.223.858	100,00	231.264	100,00	1.455.122	100,00

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2016 (diolah)

4) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin

Masyarakat Indonesia cenderung menganggap bahwa laki-laki adalah penanggung jawab ekonomi keluarga sekaligus sebagai kepala keluarga. Namun dalam kenyataannya tidak sedikit perempuan yang menjadi kepala keluarga karena pasangan meninggal, cerai atau sebab-sebab yang lain.

Karakteristik kepala keluarga menurut jenis kelamin dapat menunjukkan seberapa banyak perempuan yang menjadi

kepala keluarga, bagaimana kecenderungannya di masa depan dan bagaimana gambaran sosial ekonomi keluarga yang dikepalai oleh seorang perempuan.

Penambahan persentase kepala keluarga perempuan tersebut dapat juga menggambarkan tingkat perceraian (baik cerai hidup maupun cerai mati) yang terjadi dan juga dapat menggambarkan salah satu tren gaya hidup modern.

Tabel kepala keluarga menurut jenis kelamin dan wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 disajikan dalam Tabel 21 berikut ini :

Tabel 21.
Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin dan Wilayah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

No	Kabupaten/Kota	Laki-Laki (Jiwa)		Perempuan (Jiwa)		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Kabupaten Pesisir Selatan	117.261	9,58	20.738	8,97	137.999	9,48
2	Kabupaten Solok	83.500	6,82	14.955	6,47	98.455	6,77
3	Kabupaten Sijunjung	54.903	4,49	7.127	3,08	62.030	4,26
4	Kabupaten Tanah Datar	84.328	6,89	18.091	7,82	102.419	7,04
5	Kabupaten Padang Pariaman	92.784	7,58	22.453	9,71	115.237	7,92
6	Kabupaten Agam	112.686	9,21	25.630	11,08	138.316	9,51
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	87.946	7,19	22.124	9,57	110.070	7,56
8	Kabupaten Pasaman	69.536	5,68	14.187	6,13	83.723	5,75
9	Kabupaten Kep. Mentawai	18.627	1,52	2.326	1,01	20.953	1,44
10	Kabupaten Dharmasraya	50.763	4,15	5.153	2,23	55.916	3,84
11	Kabupaten Solok Selatan	41.998	3,43	6.038	2,61	48.036	3,30
12	Kabupaten Pasaman Barat	94.133	7,69	14.969	6,47	109.102	7,50
13	Kota Padang	198.683	16,23	34.288	14,83	232.971	16,01
14	Kota Solok	15.356	1,25	2.537	1,10	17.893	1,23
15	Kota Sawahlunto	15.150	1,24	3.271	1,41	18.421	1,27
16	Kota Padang Panjang	11.749	0,96	2.490	1,08	14.239	0,98
17	Kota Bukittinggi	26.515	2,17	5.199	2,25	31.714	2,18
18	Kota Payakumbuh	30.464	2,49	5.341	2,31	35.805	2,46
19	Kota Pariaman	17.476	1,43	4.347	1,88	21.823	1,50
	SUMATERA BARAT	1.223.858	100,00	231.264	100,00	1.455.122	100,00

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2016 (diolah)

Dari Tabel 21 tersebut terlihat bahwa mayoritas kepala keluarga di Provinsi Sumatera Barat adalah laki-laki yaitu sebanyak 1.223.858 jiwa, sedangkan perempuan yang menjadi kepala keluarga sebanyak 231.264 jiwa atau dengan perbandingan 5 : 1, yang artinya dari 5 kepala keluarga laki-laki terdapat 1 kepala keluarga perempuan. Hal yang sama juga terlihat pada di seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, dimana kepala keluarga laki-laki lebih banyak bila dibandingkan dengan kepala keluarga perempuan dengan perbandingan terbesar berada di Kabupaten Dharmasraya, yaitu 10 : 1, dan selanjutnya perbandingan terbesar juga terlihat di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu 8 : 1 dan yang terendah adalah Kota Pariaman dengan perbandingan 4 : 1. Dari Tabel 21 juga dapat dilihat bahwa jumlah kepala keluarga laki-laki terbesar berada di Kota Padang sebanyak 198.683 jiwa (16,23 persen), sedangkan untuk kepala keluarga perempuan terbesar juga berada di Kota Padang yaitu sebanyak 34.288 jiwa (14,83 persen).

5) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin

Dalam konsep demografi kepala keluarga merupakan seseorang baik laki-laki maupun perempuan, berstatus menikah maupun tidak, yang mempunyai peran, fungsi, dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologi.

Karakteristik kepala keluarga berdasarkan status kawin dapat digunakan untuk melihat jumlah keluarga yang dikepalai oleh lajang maupun mereka yang berstatus cerai baik hidup maupun mati.

Tabel kepala keluarga berdasarkan status kawin dan jenis kelamin Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 22 di bawah ini :

Tabel 22.
Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin dan Jenis Kelamin
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

No	Status Kawin	Laki-Laki (jiwa)		Perempuan (jiwa)		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Belum Kawin	18.816	1,54	10.681	4,62	29.497	2,03
2	Kawin	1.175.945	96,09	41.619	18,00	1.217.564	83,67
3	Cerai Hidup	8.860	0,72	36.460	15,77	45.320	3,11
4	Cerai Mati	20.237	1,65	142.504	61,62	162.741	11,18
TOTAL		1.223.858	100,00	231.264	100,00	1.455.122	100,00

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2016 (diolah)

Pada umumnya kepala keluarga berstatus kawin yaitu sebesar 1.217.564 jiwa (83,67 persen), dan pada umumnya laki-laki yaitu sebanyak 1.175.945 jiwa (96,09 persen). Kepala keluarga yang berstatus belum kawin hanya 29.497 jiwa (2,03 persen) saja. Meskipun demikian perlu dikaji kembali apakah mereka yang berstatus lajang ini memiliki anggota keluarga atau dia hidup sendirian. Kepala keluarga yang berstatus cerai baik cerai hidup maupun cerai mati, persentase perempuan jauh lebih besar dibandingkan laki-laki yaitu masing-masing 80,45 persen cerai hidup dan 87,56 berstatus cerai mati. Kebiasaan kawin ulang yang cepat dilakukan oleh laki-laki, menyebabkan perbedaan persentase tersebut. Selain itu, perempuan yang berstatus cerai baik hidup maupun mati, mempunyai pertimbangan untuk melakukan kawin ulang terutama apabila mereka telah memiliki anak-anak yang biasanya menjadi tanggung jawab perempuan. Meskipun pada saat ini kecenderungan tersebut sudah mulai menurun tetapi kondisi ini masih terjadi. Faktor

yang lain adalah mereka yang cerai mati, terjadi pada kelompok umur yang lebih tua, yang menyebabkan perempuan enggan untuk menikah kembali.

Dalam administrasi kependudukan, perempuan berstatus kawin yang menjadi kepala keluarga juga diberikan kepada mereka yang berstatus istri kedua, ketiga maupun keempat. Oleh sebab itu proporsi perempuan kepala keluarga yang cukup besar (3,38 persen), diduga termasuk mereka yang menjadi kepala keluarga ini adalah menjadi isteri kedua, ketiga, dan seterusnya.

Disamping itu, terlihat pula adanya kepala keluarga yang berstatus belum kawin (lajang) sebanyak 2,03 persen. Proporsi kepala keluarga laki-laki yang belum kawin lebih tinggi daripada kepala keluarga perempuan. Biasanya kepala keluarga yang berstatus belum kawin merupakan anggota keluarga yang menggantikan orang tua yang meninggal, atau kepala keluarga tersebut hidup sendirian.

Ada kecendrungan yang terjadi, jika seorang perempuan mengalami peristiwa perceraian baik cerai hidup maupun kematian, maka ketika dia melakukan perkawinan berikutnya, sering kali mereka tidak melaporkan perkawinannya. Ini terjadi karena kebanyakan mereka melakukan perkawinan siri baik dengan laki-laki yang sudah berstatus duda (tapi tidak cerai secara resmi) maupun dengan laki-laki yang masih berstatus suami perempuan lain, sehingga yang bersangkutan agak sungkan melaporkan perkawinan yang mereka alami. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah khususnya Kementerian Agama agar selalu mensosialisasikan tentang pentingnya

pernikahan dilakukan secara resmi melalui Kantor Urusan Agama (KUA) atau bagi yang telah melakukan pernikahan yang sah secara agama namun tidak memiliki buku nikah, dapat mengajukan permohonan untuk dilakukan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama sehingga perkawinannya tercatat secara hukum negara dan diakui oleh negara, dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut terlindungi haknya secara hukum.

6) Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Pendidikan

Pendidikan yang dicapai merupakan salah satu indikator kualitas hidup manusia serta menunjukkan status sosial dan status kesejahteraan seseorang. Semakin tinggi pendidikan yang dicapai oleh seorang kepala keluarga diharapkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan keluarga itu.

Untuk itu jenjang pendidikan yang dicapai oleh kepala keluarga dapat digunakan untuk melihat gambaran kualitas sosial maupun ekonomi keluarga.

Tabel karakteristik kepala keluarga menurut pendidikan dan jenis kelamin Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 23 yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan kepala keluarga yang terbesar adalah tamat SD/ sederajat sebanyak 468.585 jiwa (32,20 persen), kemudian diikuti dengan pendidikan SLTA/ sederajat sebanyak 407.963 jiwa (28,04 persen), dan SLTP/ sederajat sebanyak 266.622 jiwa (18,32 persen). Proporsi kepala keluarga yang berpendidikan D1/D2/D3 hanya sebesar 2,69 persen dan S1/S2/S3 sebesar 6,10 persen, dan masih adanya kepala keluarga yang tidak sekolah dan belum tamat SD persentasenya mencapai 12,66 persen. Gambaran diatas menunjukkan bahwa sebagian besar

kepala keluarga masih berpendidikan SD ke bawah. Hal ini sesuai dengan kondisi pendidikan secara nasional, yang harus memperoleh perhatian serius dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Proses globalisasi yang sebentar lagi berlangsung, bonus demografi yang juga akan berlangsung, harus dimanfaatkan untuk meningkatkan tingkat pendidikan penduduk Provinsi Sumatera Barat agar mempunyai daya saing global, sehingga dapat memanfaatkan bonus demografi yang akan segera berlangsung. Apabila dilihat dari tingkat pendidikan ini, maka kepala keluarga yang mempunyai pendidikan rendah diduga mempunyai pendapatan yang rendah, sehingga diduga mereka tidak mampu memberikan pendidikan yang tinggi bagi anggota keluarganya. Biasanya kepala keluarga yang berpendidikan rendah akan bekerja di sektor informal.

Tabel 23.
Kepala Keluarga Pendidikan dan Jenis Kelamin
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

No	Pendidikan	Laki-Laki (jiwa)		Perempuan (jiwa)		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Tidak/Belum Sekolah	34.978	2,86	15.020	6,49	49.998	3,44
2	Belum Tamat SD/Sederajat	100.068	8,18	34.034	14,72	134.102	9,22
3	Tamat SD/Sederajat	374.272	30,58	94.313	40,78	468.585	32,20
4	SLTP/Sederajat	234.725	19,18	31.897	13,79	266.622	18,32
5	SLTA/Sederajat	366.376	29,94	41.587	17,98	407.963	28,04
6	Diploma I/II	9.368	0,77	2.931	1,27	12.299	0,85
7	Akademi/Diploma III/Sarmud	23.177	1,89	3.633	1,57	26.810	1,84
8	Diploma IV/Strata I	72.482	5,92	7.244	3,13	79.726	5,48
9	Strata II	7.623	0,62	525	0,23	8.148	0,56
10	Strata III	789	0,06	80	0,03	869	0,06
	TOTAL	1.223.858	100,00	231.264	100,00	1.455.122	100,00

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2016 (diolah)

Jika dikaitkan dengan jenis kelamin, nampak bahwa lebih separuh (61.99 persen) kepala keluarga perempuan yang tidak bersekolah, belum tamat SD, dan tamat SD. Hal ini lebih tinggi dibandingkan dengan kepala keluarga laki-laki maka dugaan keluarga yang dikepalai perempuan akan mempunyai status ekonomi yang lebih rendah dibandingkan yang dikepalai laki-laki mendekati kenyataan.

Melihat status pendidikan, umur dan jenis kelamin, nampak bahwa kepala keluarga perempuan berada pada umur yang relatif lebih tua dan berpendidikan rendah dibandingkan dengan kepala keluarga laki-laki.

7) Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Status Bekerja

Status ekonomi keluarga dapat dilihat dari kegiatan ekonomi kepala keluarga maupun anggota keluarga serta besar sumbangan mereka terhadap ekonomi keluarga. Oleh sebab itu, informasi mengenai kepala keluarga menurut status pekerjaan perlu diketahui untuk perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk. Tabel distribusi kepala keluarga menurut status bekerja dan jenis kelamin Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 24 di bawah ini :

Tabel 24.
Distribusi Kepala Keluarga Menurut Status Bekerja dan Jenis Kelamin
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

No	Status Bekerja	Laki-Laki (jiwa)		Perempuan (jiwa)		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Bekerja	1.175.583	96,06	70.227	30,37	1.245.810	85,62
2	Belum/Tidak Bekerja	18.157	1,48	8.980	3,88	27.137	1,86
3	Pelajar/mahasiswa	3.383	0,28	2.870	1,24	6.253	0,43
4	Pensiunan	26.326	2,15	6.858	2,97	33.184	2,28
5	Mengurus Rumah Tangga	409	0,03	142.329	61,54	142.738	9,81
	Total	1.223.858	100,00	231.264	100,00	1.455.122	100,00

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2016 (diolah)

Proporsi kepala keluarga laki-laki yang bekerja lebih besar dibandingkan kepala keluarga perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa peran dan fungsi laki-laki adalah penanggung jawab ekonomi keluarga sehingga lebih banyak yang harus terjun ke pasar kerja, sementara perempuan biasanya hanya berfungsi sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab atas terselenggaranya keluarga yang bersangkutan. Meskipun demikian, perempuan pada masa kini mulai ikut terjun ke pasar kerja.

Proporsi kepala keluarga laki-laki yang mengurus rumah tangga terdapat 0,03 persen sedangkan kepala keluarga perempuan yakni sebanyak 142.329 jiwa (61,54 persen) kepala keluarga perempuan tidak bekerja pada tahun 2016. Ini perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah daerah khususnya dalam penyediaan lapangan pekerjaan industri rumah tangga bagi ibu-ibu yang menjadi kepala keluarga. Disamping itu terdapat pula kepala keluarga yang sudah pensiun sebesar 2,28 persen dengan proporsi jumlah pensiunan laki-laki lebih besar dari kepala keluarga perempuan. Walaupun persentasenya tidak terlalu signifikan, namun hal ini juga harus menjadi perhatian serius pemerintah khususnya instansi terkait dalam hal penyediaan program-program yang memperhatikan para manula yang sudah tidak produktif lagi.

Disamping itu, dari Tabel 24 juga terlihat bahwa terdapat 6.253 jiwa (0,43 persen) kepala keluarga yang mempunyai pekerjaan sebagai pelajar/mahasiswa. Walau data ini perlu ditelisik lagi kebenarannya, namun demikian, bukan tidak mungkin ada kepala keluarga yang memang masih usia sekolah, dikarenakan

orang tuanya sudah meninggal atau karena alasan permasalahan sosial masyarakat lainnya sehingga yang bersangkutan terpaksa menanggung beban keluarga dalam melanjutkan kehidupannya. Bagi mereka itu mungkin perlu perhatian dari Dinas Pendidikan khususnya dalam hal menjamin ketersediaan kesempatan menempuh pendidikan bagi mereka sehingga mereka bisa mandiri dan bisa mencapai cita-cita untuk masa depan yang lebih baik.

2. Kualitas Penduduk

a. Kesehatan

1) *Rasio Anak dan Perempuan (Child Women Ratio/CWR)*

Rasio anak dan perempuan adalah rasio antara jumlah anak dibawah 5 (lima) tahun di suatu tempat pada suatu waktu dengan penduduk perempuan usia 15-49 tahun. Rasio ini untuk melihat tingkat fertilitas pada suatu wilayah dan rasio ini berguna sebagai indikator fertilitas penduduk.

Rasio anak dan perempuan/Child Women Ratio (CWR) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 25 di bawah ini, yang menunjukkan angka rasio sebesar 24,33 persen artinya bahwa pada Tahun 2016 per 31 Desember 2016 terdapat 24 sampai dengan 25 anak dibawah 5 tahun (0-4 tahun) dari setiap perempuan usia 15-49 tahun.

Bila diklasifikasikan berdasarkan Kabupaten/Kota, persentase CWR terbesar berada pada Kota Padang Panjang yaitu sebesar 31,31 persen, selanjutnya adalah Kota Solok dengan CWR sebesar 31,16 persen, sedangkan untuk persentase CWR terkecil berada pada Kabupaten Tanah Datar, yaitu sebesar 20,03 persen.

Tabel 25.
Rasio Anak dan Perempuan (Child Women Ratio/CWR)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

No	KABUPATEN/KOTA	Penduduk Perempuan Usia 15-49 Tahun	Penduduk Usia 0-4 Tahun	Rasio Anak dan Perempuan (CWR)
1	Kabupaten Pesisir Selatan	139.890	29.870	21,35
2	Kabupaten Solok	99.269	22.893	23,06
3	Kabupaten Sijunjung	62.604	15.523	24,80
4	Kabupaten Tanah Datar	91.481	18.327	20,03
5	Kabupaten Padang Pariaman	118.899	25.296	21,28
6	Kabupaten Agam	132.378	30.923	23,36
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	95.789	22.546	23,54
8	Kabupaten Pasaman	84.540	19.873	23,51
9	Kabupaten Kep. Mentawai	22.750	4.869	21,40
10	Kabupaten Dharmasraya	56.720	15.760	27,79
11	Kabupaten Solok Selatan	49.798	11.575	23,24
12	Kabupaten Pasaman Barat	118.410	28.334	23,93
13	Kota Padang	242.215	67.117	27,71
	Kota Solok	18.682	5.822	31,16
15	Kota Sawahlunto	16.657	4.784	28,72
16	Kota Padang Panjang	13.968	4.374	31,31
17	Kota Bukittinggi	31.066	8.683	27,95
18	Kota Payakumbuh	33.964	10.173	29,95
19	Kota Pariaman	23.538	6.748	28,67
	SUMATERA BARAT	1.452.618	353.490	24,33

Sumber : Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II Tahun 2016

2) Rasio Tenaga Kesehatan terhadap 10.000 jumlah Penduduk

Informasi yang dapat disajikan dari database kependudukan terkait dengan aspek kesehatan adalah jumlah tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, bidan, apoteker, dan psikiater/psikolog di masing-masing Kabupaten/Kota. Selanjutnya, dari data-data tersebut dapat diketahui berapa rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk. Data-data tersebut dapat dilihat pada Tabel 26 dan Rasio Tenaga Kesehatan terhadap 10.000 jumlah penduduk dapat dilihat pada Tabel 27.

Tabel 26.
Jumlah Tenaga Kesehatan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

NO	KABUPATEN/KOTA	Tenaga Kesehatan					Total
		Dokter	Bidan	Perawat	Apoteker	Psikolog	
1	Kabupaten Pesisir Selatan	62	374	191	7	1	635
2	Kabupaten Solok	33	125	116	6	0	280
3	Kabupaten Sijunjung	37	160	109	7	1	314
4	Kabupaten Tanah Datar	83	198	150	16	0	447
5	Kabupaten Padang Pariaman	49	278	114	14	0	455
6	Kabupaten Agam	93	232	258	53	3	639
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	41	138	96	11	0	286
8	Kabupaten Pasaman	42	168	147	7	0	364
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	5	68	69	3	0	145
10	Kabupaten Dharmasraya	70	221	103	8	0	402
11	Kabupaten Solok Selatan	24	143	91	8	0	266
12	Kabupaten Pasaman Barat	62	428	242	16	1	749
13	Kota Padang	1.088	623	867	100	6	2.684
14	Kota Solok	51	67	90	9	0	217
15	Kota Sawahlunto	14	40	47	5	0	106
16	Kota Padang Panjang	53	63	100	7	0	223
17	Kota Bukittinggi	157	112	199	29	5	502
18	Kota Payakumbuh	77	121	76	8	2	284
19	Kota Pariaman	43	106	71	1	0	221
	SUMATERA BARAT	2.084	3.665	3.136	315	19	9.219

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2016 (diolah)

Dari data pada Tabel 27 terlihat bahwa di Provinsi Sumatera Barat dari 10.000 jiwa penduduk rata-rata dilayani oleh tenaga dokter sebanyak 3-4 orang, bidan sebanyak 6-7 orang, perawat sebanyak 5-6 orang, apoteker 1 orang, dan psikolog 1 orang.

Bila diklasifikasikan menurut Kabupaten/Kota, maka rasio tenaga kesehatan terhadap 10.000 jumlah penduduk yang terbesar berada di Kota Bukittinggi yaitu sebesar 43,41, ini berarti 10.000 jiwa penduduk Kota Bukittinggi rata-rata dilayani oleh 43 orang tenaga kesehatan yang terdiri dari 13-14 orang dokter, 9-10 orang bidan, 17-18 orang perawat, 2-3 orang apoteker, dan 0-1 orang psikolog. Sedangkan rasio yang terkecil berada di Kabupaten

Solok dengan rasio 7,47, yang berarti untuk 10.000 jiwa penduduk Kabupaten Solok dilayani oleh 7-8 orang tenaga kesehatan.

Tabel 27.
Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap 10.000 Jumlah Penduduk
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

NO	KABUPATEN/KOTA	Tenaga Kesehatan					Total
		Dokter	Bidan	Perawat	Apoteker	Psikolog	
1	Kabupaten Pesisir Selatan	1,20	7,24	3,70	0,14	0,02	12,29
2	Kabupaten Solok	0,88	3,34	3,10	0,16	0	7,47
3	Kabupaten Sijunjung	1,59	6,87	4,68	0,30	0,04	13,49
4	Kabupaten Tanah Datar	2,27	5,42	4,11	0,44	0	12,25
5	Kabupaten Padang Pariaman	1,06	6,03	2,47	0,30	0	9,88
6	Kabupaten Agam	1,78	4,43	4,93	1,01	0,06	12,21
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	1,10	3,70	2,57	0,29	0	7,67
8	Kabupaten Pasaman	1,34	5,34	4,67	0,22	0	11,57
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	0,60	8,17	8,29	0,36	0	17,41
10	Kabupaten Dharmasraya	3,43	10,83	5,05	0,39	0	19,69
11	Kabupaten Solok Selatan	1,36	8,08	5,14	0,45	0	15,03
12	Kabupaten Pasaman Barat	1,45	10,02	5,66	0,37	0,02	17,53
13	Kota Padang	12,35	7,07	9,84	1,13	0,07	30,46
14	Kota Solok	7,51	9,86	13,25	1,32	0	31,94
15	Kota Sawahlunto	2,18	6,24	7,33	0,78	0	16,54
16	Kota Padang Panjang	10,01	11,90	18,89	1,32	0	42,13
17	Kota Bukittinggi	13,58	9,69	17,21	2,51	0,43	43,41
18	Kota Payakumbuh	5,95	9,35	5,87	0,62	0,15	21,95
19	Kota Pariaman	4,85	11,95	8,00	0,11	0	24,91
	SUMATERA BARAT	3,82	6,72	5,75	0,58	0,03	16,91

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2016 (diolah)

3) *Data Jumlah Penduduk Menurut Golongan Darah Berdasarkan Jenis Kelamin*

Data lain yang dapat dihasilkan dari database kependudukan terkait dengan kesehatan adalah jumlah penduduk menurut golongan darah berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada Tabel 28 di bawah, yang menunjukkan bahwa sebanyak 4.885.150 jiwa (89,60 persen) tidak diketahui golongan darahnya, ini menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran penduduk untuk mengisi elemen data terkait golongan darah ini, atau memang sebagian besar penduduk Provinsi Sumatera Barat tidak

mengetahui golongan darahnya masing-masing. Untuk itu, di beberapa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota seperti Kabupaten Padang Pariaman telah menyediakan fasilitas pemeriksaan darah bagi penduduk yang akan melakukan pendaftaran untuk membuat dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el). Data golongan darah ini sangat diperlukan bila sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang memang membutuhkan informasi tentang golongan darah seseorang.

Tabel 28.
Jumlah Penduduk Menurut Golongan Darah dan Jenis Kelamin
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

No	Golongan Darah	Laki-Laki (jiwa)		Perempuan (jiwa)		Total (jiwa)	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	A	74.334	2,70	71.190	2,64	145.524	2,67
2	B	53.166	1,93	55.127	2,05	108.293	1,99
3	AB	29.599	1,07	26.125	0,97	55.724	1,02
4	O	116.659	4,23	99.639	3,70	216.298	3,97
5	A+	3.810	0,14	3.381	0,13	7.191	0,13
6	A-	158	0,01	256	0,01	414	0,01
7	B+	1.493	0,05	1.230	0,05	2.723	0,05
8	B-	122	0,00	228	0,01	350	0,01
9	AB+	956	0,03	817	0,03	1.773	0,03
10	AB-	1.596	0,06	1.484	0,06	3.080	0,06
11	O+	2.730	0,10	1.966	0,07	4.696	0,09
12	O-	10.718	0,39	10.340	0,38	21.058	0,39
13	Tidak Tahu	2.462.702	89,29	2.422.448	89,91	4.885.150	89,60
	Total	2.758.043	100,00	2.694.231	100,00	5.452.274	100,00

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2016 (diolah)

b. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas penduduk baik di daerah maupun nasional. Untuk mengukur tingkat kualitas Pendidikan suatu daerah, dibutuhkan beberapa data. Database kependudukan dapat memberikan beberapa yang

berhubungan dengan informasi perkembangan Pendidikan maupun untuk menghitung beberapa indikator untuk mengukur tingkat pencapaian Pendidikan di suatu daerah. Data jumlah penduduk menurut usia sekolah SD, SLTP, dan SLTA berdasarkan Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel 29 berikut ini :

Tabel 29.
Jumlah Penduduk Menurut Usia Sekolah dan Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

NO	KABUPATEN/KOTA	Usia SD (7-12 Tahun)		Usia SLTP (13-15 Tahun)		Usia SLTA (16-18 Tahun)		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Kabupaten Pesisir Selatan	58.931	9,38	30.997	9,53	31.533	9,79	121.461	9,52
2	Kabupaten Solok	43.111	6,86	23.383	7,19	23.461	7,28	89.955	7,05
3	Kabupaten Sijunjung	29.085	4,63	14.795	4,55	14.306	4,44	58.186	4,56
4	Kabupaten Tanah Datar	38.035	6,05	20.377	6,27	21.301	6,61	79.713	6,25
5	Kabupaten Padang Pariaman	52.255	8,32	28.724	8,83	30.009	9,31	110.988	8,70
6	Kabupaten Agam	57.099	9,09	30.375	9,34	31.310	9,72	118.784	9,31
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	43.221	6,88	22.429	6,90	21.821	6,77	87.471	6,86
8	Kabupaten Pasaman	38.943	6,20	19.607	6,03	19.694	6,11	78.244	6,13
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	12.395	1,97	6.115	1,88	5.471	1,70	23.981	1,88
10	Kabupaten Dharmasraya	25.309	4,03	12.267	3,77	10.027	3,11	47.603	3,73
11	Kabupaten Solok Selatan	20.262	3,23	10.545	3,24	11.256	3,49	42.063	3,30
12	Kabupaten Pasaman Barat	55.847	8,89	27.930	8,59	27.197	8,44	110.974	8,70
13	Kota Padang	94.680	15,07	47.774	14,69	47.566	14,76	190.020	14,90
14	Kota Solok	7.936	1,26	4.046	1,24	3.451	1,07	15.433	1,21
15	Kota Sawahlunto	6.985	1,11	3.528	1,08	3.426	1,06	13.939	1,09
16	Kota Padang Panjang	6.024	0,96	3.102	0,95	2.472	0,77	11.598	0,91
17	Kota Bukittinggi	13.336	2,12	6.603	2,03	5.731	1,78	25.670	2,01
18	Kota Payakumbuh	15.218	2,42	7.381	2,27	6.767	2,10	29.366	2,30
19	Kota Pariaman	9.550	1,52	5.207	1,60	5.447	1,69	20.204	1,58
	SUMATERA BARAT	628.222	100,00	325.185	100,00	322.246	100,00	1.275.653	100,00

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2016 (diolah)

Dari data pada Tabel 29 menunjukkan bahwa penduduk usia SD (7-12 tahun) terbanyak berada di Kota Padang yaitu sebanyak 94.680 jiwa atau 15,07 persen dari jumlah usia SD yang ada di seluruh Provinsi Sumatera Barat, diikuti oleh Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 58.931 jiwa (9,38 persen), sedangkan yang terkecil berada di Kota Padang Panjang sebanyak 6.024 jiwa (0,96 persen).

Untuk usia SLTP, jumlah penduduk terbanyak berada di Kota Padang sebanyak 47.774 jiwa (14,69 persen), diikuti oleh Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 30.997 jiwa (9,53 persen), sedangkan yang terkecil berada di Kota Padang Panjang sebanyak 3.102 jiwa (0,95 persen).

Selanjutnya, untuk usia SLTA, jumlah penduduk terbanyak berada di Kota Padang sebanyak 47.566 jiwa (14,76 persen), diikuti oleh Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 31.533 jiwa (9,79 persen), dan untuk jumlah terkecil berada di Kota Padang Panjang sebanyak 2.472 jiwa (0,77 persen).

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk semua usia Pendidikan baik, SD, SLTP, maupun SLTA, jumlah terbanyak berada di Kota Padang dan jumlah terkecil berada di Kota Padang Panjang, hal ini sebanding dengan jumlah penduduk yang ada di kedua Kota tersebut yang juga merupakan Kota dengan penduduk terbesar dan terkecil.

c. Sosial

Proporsi Penduduk Penyandang Cacat

Indikator ini menguraikan jumlah dan proporsi penyandang cacat dirinci menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Jumlah penduduk penyandang cacat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 30, yang menunjukkan bahwa dari seluruh penduduk penyandang cacat di Provinsi Sumatera Barat, penduduk penyandang cacat mental/jiwa adalah yang terbanyak yaitu sebesar 1.234 jiwa (26,14 persen), diikuti oleh penyandang cacat fisik sebanyak 1.135 jiwa (24,04 persen), sedangkan yang terkecil adalah penyandang cacat lainnya yaitu sebesar 405 jiwa (8,58 persen).

Tabel 30.
Jumlah Penduduk Penyandang Cacat Menurut Jenis Kelamin
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

NO	JENIS KECACATAN	JENIS KELAMIN (JIWA)				TOTAL (JIWA)	
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN		Jumlah	%
		Jumlah	%	Jumlah	%		
1	Cacat Fisik	666	24,28	469	23,71	1.135	24,04
2	Cacat Netra/Buta	262	9,55	199	10,06	461	9,76
3	Cacat Rungu/Wicara	467	17,03	444	22,45	911	19,30
4	Cacat Mental/Jiwa	786	28,65	448	22,65	1.234	26,14
5	Cacat Fisik dan Mental	328	11,96	247	12,49	575	12,18
6	Cacat Lainnya	234	8,53	171	8,65	405	8,58
	JUMLAH	2.743	100,00	1.978	100,00	4.721	100,00

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2016 (diolah)

Sementara itu, untuk angka penyandang cacat Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel 31 di bawah, dimana angka penduduk penyandang cacat di Provinsi Sumatera Barat sebesar 0,09 persen, artinya bahwa sebagian kecil penduduk di Provinsi Sumatera Barat yang menyandang cacat. Namun ini tetap harus menjadi perhatian pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk tetap memberikan pelayanan sosial bagi mereka. Bila diklasifikasikan menurut Kabupaten/Kota, maka angka penyandang cacat terbesar berada di Kota Sawahlunto yaitu sebesar 0,30 persen, diikuti oleh Kota Solok dan Kabupaten Tanah Datar sebesar 0,18 persen. Sedangkan angka penyandang cacat yang terkecil berada di Kota Payakumbuh yang hanya sebesar 0,01 persen diikuti oleh Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 0,03 persen.

Tabel 31.
Angka Penyandang Cacat Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

NO	KABUPATEN/ KOTA	JENIS KECACATAN (JIWA)						Jumlah Penduduk	Angka Penyandang Cacat
		Cacat Fisik	Cacat Netra/ Buta	Cacat Rungu/ Wicara	Cacat Mental/ Jiwa	Cacat Fisik & Mental	Cacat Lainnya		
1	Kabupaten Pesisir Selatan	56	16	34	46	18	22	516.719	0,04
2	Kabupaten Solok	64	30	39	79	43	17	374.676	0,07
3	Kabupaten Sijunjung	67	39	76	47	43	24	232.749	0,13
4	Kabupaten Tanah Datar	169	51	114	209	79	29	365.040	0,18
5	Kabupaten Padang Pariaman	39	16	24	42	22	4	460.742	0,03
6	Kabupaten Agam	144	37	52	156	49	25	523.335	0,09
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	21	11	20	40	11	11	372.949	0,03
8	Kabupaten Pasaman	120	73	124	145	70	17	314.530	0,17
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	20	6	10	15	8	7	83.267	0,08
10	Kabupaten Dharmasraya	17	9	30	15	14	10	204.149	0,05
11	Kabupaten Solok Selatan	18	11	28	15	19	3	176.931	0,05
12	Kabupaten Pasaman Barat	47	28	37	57	26	32	427.358	0,05
13	Kota Padang	203	63	202	213	101	137	881.128	0,10
14	Kota Solok	29	11	34	28	9	10	67.942	0,18
15	Kota Sawahlunto	39	12	44	42	27	31	64.106	0,30
16	Kota Padang Panjang	18	6	11	11	2	4	52.935	0,10
17	Kota Bukittinggi	12	16	5	19	5	10	115.639	0,06
18	Kota Payakumbuh	2	2	2	2	1	1	129.362	0,01
19	Kota Pariaman	50	24	25	53	28	11	88.717	0,22
	SUMATERA BARAT	1.135	461	911	1.234	575	405	5.452.274	0,09

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2016 (diolah)

3. Kepemilikan Dokumen Kependudukan

a. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) berguna untuk mengetahui jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat yang telah memiliki KTP-el per 31 Desember 2016 dan dapat dilihat pada Tabel 32 di bawah ini :

Tabel 32.
Kepemilikan KTP-el Provinsi Sumatera Barat
Per 31 Desember 2016

NO	KABUPATEN/KOTA	Wajib KTP (Jiwa)	Kepemilikan KTP-el (Jiwa)	%
1	Kabupaten Pesisir Selatan	368.020	297.078	80,72
2	Kabupaten Solok	264.661	226.448	85,56
3	Kabupaten Sijunjung	160.463	141.951	88,46
4	Kabupaten Tanah Datar	269.522	249.908	92,72
5	Kabupaten Padang Pariaman	328.912	260.149	79,09
6	Kabupaten Agam	375.442	324.188	86,35
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	265.625	248.058	93,39
8	Kabupaten Pasaman	217.646	160.495	73,74
9	Kabupaten Kep. Mentawai	54.946	49.998	90,99
10	Kabupaten Dharmasraya	138.995	127.912	92,03
11	Kabupaten Solok Selatan	124.284	92.353	74,31
12	Kabupaten Pasaman Barat	288.634	231.223	80,11
13	Kota Padang	625.401	583.814	93,35
14	Kota Solok	46.134	43.707	94,74
15	Kota Sawahlunto	45.225	43.183	95,48
16	Kota Padang Panjang	36.822	34.963	94,95
17	Kota Bukittinggi	80.660	75.695	93,84
18	Kota Payakumbuh	89.779	86.144	95,95
19	Kota Pariaman	62.317	57.957	93,00
	SUMATERA BARAT	3.843.488	3.335.224	86,78

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2016 (diolah)

Adapun target nasional yang harus dicapai dalam perekaman dan kepemilikan KTP-el pada akhir tahun 2017 adalah sebesar 100 persen dari target Wajib KTP pada akhir tahun 2017 nanti. Untuk itu Kabupaten/Kota harus mempunyai strategi untuk mencapai target nasional tersebut dengan melakukan inovasi-inovasi dalam pelayanan.

b. Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun

Persentase kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun berguna untuk mengetahui jumlah penduduk 0-18 tahun yang memiliki akta

kelahiran, dimana target yang harus dicapai untuk cakupan kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 tahun pada tahun 2017 adalah 85 persen dan dapat dilihat Tabel 33 di bawah ini :

Tabel 33.
Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2016

NO	KABUPATEN/KOTA	Anak 0-18 thn (Jiwa)	Kepemilikan Akta (Jiwa)	%
1	Kabupaten Pesisir Selatan	168.676	154.274	91,46
2	Kabupaten Solok	124.906	97.137	77,77
3	Kabupaten Sijunjung	81.099	50.186	61,88
4	Kabupaten Tanah Datar	108.858	79.797	73,30
5	Kabupaten Padang Pariaman	150.386	81.233	54,02
6	Kabupaten Agam	167.803	106.988	63,76
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	120.307	89.344	74,26
8	Kabupaten Pasaman	109.194	56.281	51,54
9	Kabupaten Kep. Mentawai	31.835	14.839	46,61
10	Kabupaten Dharmasraya	71.502	35.346	49,43
11	Kabupaten Solok Selatan	59.865	36.612	61,16
12	Kabupaten Pasaman Barat	155.949	75.859	48,64
13	Kota Padang	284.771	198.960	69,87
14	Kota Solok	23.924	21.650	90,49
15	Kota Sawahlunto	21.036	18.278	86,89
16	Kota Padang Panjang	17.739	16.785	94,62
17	Kota Bukittinggi	38.729	31.806	82,12
18	Kota Payakumbuh	43.649	30.558	70,01
19	Kota Pariaman	29.794	22.688	76,15
	SUMATERA BARAT	1.810.022	1.218.621	67,33

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2016 (diolah)

Dari Tabel 33 tersebut dapat dilihat bahwa persentase kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 tahun per 31 Desember 2016 adalah sebesar 67,33 persen dan ini berarti masih ada sekitar 17,67 persen lagi yang harus dicapai Kabupaten/Kota untuk mencapai target nasional yang telah ditetapkan.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Data kependudukan dapat memberikan gambaran mengenai status data kependudukan yang ada saat ini di Provinsi Sumatera Barat, termasuk kesenjangan pembangunan. Dari gambaran tersebut dapat memberikan sejumlah rekomendasi untuk menyusun kebijakan daerah, penelitian, dan sebagai dasar bagi pendataan yang lain yang berkaitan dengan kependudukan. Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 ini agar dapat digunakan oleh instansi pemerintah/swasta maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan. Dalam buku ini telah disajikan data kependudukan berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2016 yang telah diolah .

Selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut tentang kondisi ke depan tentang penduduk dan permasalahannya, maka Profil Perkembangan kependudukan Provinsi Sumatera Barat ini akan disajikan secara berkala. Pada Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat mendatang akan dilakukan berbagai usaha untuk menyajikan data yang lebih lengkap, akurat dan valid, antara lain dengan memperbaiki sistem yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dan melibatkan Dinas teknis terkait dalam mengolah dan menyajikan data kependudukan ini. Data yang valid dan akurat juga sangat tergantung pada karakter dan perilaku masyarakat sendiri, sehingga diharapkan masyarakat yang melakukan registrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Sumatera Barat dapat memberikan dan mengisi biodatanya dengan benar dan lengkap serta tidak

terlambat melakukan registrasi apabila terjadi peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pindah dan datang.

B. SARAN

Demikian yang dapat kami susun dan sajikan dalam buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016. Kami menyadari, Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 ini masih jauh dari sempurna. Kami berharap kritikan dan saran yang membangun, baik dari pengguna data maupun pemerhati masalah kependudukan, demi sempurnanya penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Semoga buku Profil Perkembangan Kependudukan ini berguna bagi kita semua, khususnya pengambil kebijakan dalam pembangunan yang berwawasan kependudukan.

